

SALINAN

PERATURAN BUPATI PEKALONGAN
NOMOR 84 TAHUN 2017

TENTANG

POLA KLASIFIKASI KEARSIPAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEKALONGAN,

Menimbang : bahwa guna tertib pembuatan, penerimaan dan pengelolaan arsip dinas pada instansi/unit kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan sebagaimana ketentuan Pasal 17 Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kearsipan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pola Klasifikasi Kearsipan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1986 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan ke Kota Kajen di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 70);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
8. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Klasifikasi Arsip;
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kearsipan di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 Nomor 1 Tahun 2015, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 75);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kearsipan (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2015 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 47);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN BUPATI TENTANG POLA KLASIFIKASI KEARSIPAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pekalongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Pekalongan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Kearsipan adalah hal-hal yang berkenaan dengan arsip.
6. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
7. Pedoman adalah ketentuan yang menjadi dasar dalam menentukan atau melaksanakan kegiatan.
8. Klasifikasi adalah pembagian/pengelompokan arsip (record/surat) berdasarkan kesamaan jenis, permasalahan ataupun kegiatan.
9. Pola Klasifikasi Kearsipan adalah susunan yang sistematis dari pengelompokan arsip yang dibuat berdasarkan atas kebutuhan/kepentingan organisasi.
10. Pola Klasifikasi Kearsipan Pemerintah Kabupaten Pekalongan merupakan klasifikasi yang disusun berdasarkan masalah yang mencerminkan fungsi dan kegiatan pelaksanaan dari semua SKPD dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan.
11. Kode adalah alat untuk mengenali masalah yang terkandung dalam arsip dan sebagai penentu letak arsip disimpan.
12. Numerik adalah sistem penyimpanan dokumen berdasarkan kode nomor sebagai ganti atas nama bidang, subbidang dan jenis urusan yang berlaku di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini, guna pedoman pembuatan, penerimaan dan pengelolaan arsip dinas pada instansi/unit kerja, Perangkat Daerah/lembaga/Badan Usaha Milik Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan dalam file sistem numerik (*numeric filling system*).

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini, adalah:

- a. terciptanya arsip dinas dari kegiatan yang dilakukan oleh instansi/unit kerja, Perangkat Daerah/lembaga/Badan Usaha Milik Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan yang efektif dan efisien;
- b. menjamin ketersediaan arsip dinas yang autentik dan terpercaya dari instansi/unit kerja, Perangkat Daerah/lembaga/Badan Usaha Milik Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan;
- c. menjamin terwujudnya pengelolaan arsip dinas yang andal dan pemanfaatan arsip dinas pada instansi/unit kerja, Perangkat Daerah/lembaga/Badan Usaha Milik Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. mewujudkan penyelenggaraan kearsipan sebagai satu sistem yang terpadu dan dinamis pada instansi/unit kerja, Perangkat Daerah/lembaga/Badan Usaha Milik Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan; dan
- e. meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam pengelolaan dan pemanfaatan arsip dinas pada instansi/unit kerja, Perangkat Daerah/lembaga/Badan Usaha Milik Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan.

BAB III POLA KLASIFIKASI KEARSIPAN

Pasal 4

- (1) Pola Klasifikasi Kearsipan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan menggunakan file sistem numerik (*numeric filling system*), meliputi kode-kode dalam bentuk nomor.
- (2) Rincian kode-kode nomor dalam file sistem numerik (*numeric filling system*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pola Klasifikasi Kearsipan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2007 Nomor 35), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pekalongan.

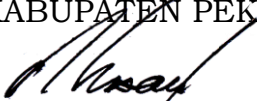
Ditetapkan di Kajen
pada tanggal 13 November 2017

BUPATI PEKALONGAN,
ttd
ASIP KHOLBIHI

Diundangkan di Kajen
Pada tanggal 13 November 2017
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN
Ttd
MUKAROMAH SYAKOER

BERITA DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2017 NOMOR 85

Salinan sesuai aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEKALONGAN


AGUS PRANOTO, SH, MH
Pembina Tk. I
NIP. 19670914 199703 1 005

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI PEKALONGAN
NOMOR 84 TAHUN 2017
TENTANG POLA KLASIFIKASI KEARSIPAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN PEKALONGAN

KODE	KLASIFIKASI
000	UMUM
001	Lambang
001 .1	Garuda
001 .2	Bendera Kebangsaan
001 .3	Daerah (Provinsi / Kabupaten / Kota)
001 .4	Bandir / Umbul-Umbul
002	Tanda Kehormatan / Penghargaan (khusus untuk Non PNS)
002 .1	Bintang
002 .2	Satyalencana
002 .3	Satyakarya Nugraha
002 .4	Penghargaan Secara Adat
002 .5	Penghargaan Lainnya (Kalpataru, Upakarti, Adipura dsb)
003	Hari Raya / Besar
003 .1	Peringatan Hari Besar Nasional/Keagamaan
004	Ucapan
004 .1	Terima Kasih
004 .2	Selamat
004 .3	Mohon Diri
004 .4	Bela Sungkawa
004 .5	Ucapan Lainnya
005	Undangan
006	Tanda Jabatan
006 .1	Pamong Praja
006 .2	Pejabat Lainnya
010	URUSAN DALAM
011	Gedung Kantor, Termasuk Instansi
011 .1	Listrik
011 .2	Telepon
011 .3	Otomasi
011 .4	Air Minum
011 .5	Hidrant
011 .6	Alarm
011 .7	Internet
012	Rumah Dinas
013	Akomodasi / Persinggahan (Mess / Wisma / Hotel)
014	Rumah Susun / Apartemen
015	Peminjaman Sarana Prasarana Kantor (Ruangan, Gedung, Kendaraan, LCD, Laptop dll)
016	Pengurusan Kendaraan Dinas
017	Keamanan / Ketertiban Kantor

- 018 Kebersihan Kantor
- 019 Protokol
- 019 .1 Upacara Bendera
- 019 .2 Tata Tempat
- 019 .21 Pemasangan Gambar Presiden / Wakil Presiden
- 019 .3 Audiensi
- 019 .4 Penerimaan Tamu
- 019 .5 Kerjasama
- 020 BARANG DAN JASA
- 021 Penawaran
- 021 .1 Penawaran Barang
- 021 .2 Penawaran Jasa
- 022 Barang
- 022 .1 Barang Bergerak
- 022 .2 Barang Tidak Bergerak
- 022 .3 Pesanan Barang
- 024 .4 Berita Acara Penerimaan/ Pemeriksaan Barang
- 025 Jasa
- 026 Berita Acara Penerimaan/ Pemeriksaan Jasa
- 027 Pengadaan Termasuk Pengumuman Pengadaan, Penunjukan, Lelang
- 027 .1 Prakualifikasi : Rapat Persiapan, HPS, Penjelasan Pekerjaan / Anwijzing, Negoisasi, Evaluasi
- 027 .2 SPK, Kontrak / Amandemen / Addendum, Teguran
- 027 .3 Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK)
- 027 .4 Serah Terima Pekerjaan
- 027 .5 Pemeriksaan Pekerjaan
- 027 .6 Perpanjangan Waktu / Forcw Majore
- 027 .7 Denda
- 027 .8 Sanggahan
- 027 .9 Pemeliharaan Barang / Jasa
- 028 Inventaris
- 028 .1 Pendataan Barang Milik Negara
- 028 .2 Pemeliharaan Barang Milik Negara
- 028 .3 Penghapusan Barang Milik Negara
- 030 KEKAYAAN DAERAH
- 030 .1 Perijinan Bidang Aset Daerah
- 031 Barang-Barang Tidak Bergerak (Tanah, Perkebunan, Pertanian, Hutan, Tambak)
- 032 Barang-barang Tidak Bergerak (Gedung, Asrama, Monumen / Bangunan Bersejarah dll)
- 033 Tanaman
- 034 Alat-alat Berat
- 035 Hewan
- 036 Barang Persediaan Dalam Gudang
- 037 Alat Pengangkut (darat, laut, udara)
- 038 Peralatan Pabrik, Laboratorium
- 039 Peralatan Kesehatan / Medis (Rumah Sakit, Balai Pengobatan)

040 PERPUSTAKAAN / DOKUMEN / KEARSIPAN / SANDI
 041 Perpustakaan
 041 .1 Pameran Bahan Perpustakaan
 041 .2 Pengolahan (Katalog, Bibliografi)
 041 .3 Sirkulasi / Layanan
 041 .31 Keanggotaan
 041 .32 Peminjaman dan Pengembalian
 041 .4 Deposit
 041 .5 Pemeliharaan, Pelestarian / Alih Media
 041 .6 Pembinaan Perpustakaan
 041 .61 Bantuan Buku, Rak
 041 .7 Penghapusan / Penyusutan Bahan Perpustakaan
 041 .8 Jenis - Jenis Perpustakaan (Umum, Khusus, PT, Sekolah, Keliling,
 Masyarakat)
 041 .9 Kemitraan, Forum Perpustakaan, Kerjasama Antar Perpustakaan
 042 Dokumentasi
 043 -
 044 -
 045 Kearsipan
 045 .1 Pola Klasifikasi
 045 .2 Akuisisi Arsip
 045 .3 Penyusutan Arsip
 045 .31 Jadwal Retensi Arsip
 045 .32 Penilaian Arsip
 045 .33 Pemindahan Arsip
 045 .34 Penyerahan Arsip
 045 .35 Pemusnahan Arsip
 045 .4 Pembinaan Kearsipan
 045 .41 Pengawasan
 045 .42 Bimbingan Kearsipan
 045 .5 Pemeliharaan, Pelestarian / Konservasi Arsip
 045 .51 Fumigasi dan Termit Control
 045 .52 Laminasi
 045 .53 Alih Media
 045 .6 Layanan
 045 .7 Pemasyarakatan
 045 .71 Pameran
 045 .72 Penerbitan Naskah Sumber Arsip
 045 .73 Sosialisasi Kearsipan
 045 .8 Pengembangan Sistem
 045 .81 Sistem Kearsipan
 045 .82 Sistem Jaringan Informasi Kearsipan
 046 Sandi
 047 Telegram, Telex, Radio, ISB
 048 Data Elektronik
 049 -
 050 PERENCANAAN DAN EVALUASI

- Meliputi RPJPN (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional),
 RPJPD (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah),
 Musrenbang, Musrenbangpus antar Kementrian, Musrenbangnas,
 Musrenbangdes
- 050 .1 RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional)
 - 050 .11 RENSTRA (Rencana Strategi)
 - 050 .12 RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional)
 - 050 .13 RENSTRA BAPPEDA
 - 050 .2 Program Nasional
 - 050 .21 RKP (Rencana Kerja Pembangunan)
 - 050 .22 RKA (Rencana Kerja Anggaran)
 - 050 .23 RKPD (Rencana Kerja Pembangunan Daerah)
 - 050 .24 Rencana Kerja SKPD
 - 050 .25 KUA (Kebijakan Umum Anggaran), KUPA (Kebijakan Umum
Perubahan Anggaran) dan PPAS (Penetapan Plafon Anggaran
Sementara)
 - 050 .26 Jawaban Gubernur Atas Pandangan Fraksi
 - 050 .27 Nota Keuangan
 - 050 .28 RKT (Rencana Kerja Tahunan)
 - 050 .29 RKO (Rencana Kerja Operasional)
 - 050 .3 RUP (Rencana Umum Pengadaan
 - 051 Laporan
 - 051 .1 Laporan Berkala
 - 051 .2 LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)
 - 051 .3 Laporan Kemajuan Fisik dan Keuangan Kegiatan APBD
 - 051 .4 Laporan Kemajuan Fisik dan Kegiatan Bantuan Keuangan Dana
Alokasi Khusus (DAK), Bantuan Provinsi, Dekonsentrasi, Urusan
Bersama dan Tugas Pembantuan
 - 052 Evaluasi
 - 052 .1 Evaluasi Rencana Strategis
 - 052 .11 Evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
 - 052 .12 Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah
 - 052 .13 Evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten/Kota
 - 052 .14 Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 - 060 ORGANISASI / KETATALAKSANAAN
 - 061 Organisasi
 - 061 .1 Susunan Organisasi dan Tata Kerja
 - 061 .2 Tata Tertib Kantor, Termasuk Pengaturan Hari dan Jam Kerja
Pegawai
 - 061 .3 Libur Nasional/Libur Bersama
 - 062 Organisasi Badan Non Pemerintah
 - 063 Organisasi Badan Internasional
 - 064 Organisasi Semi Pemerintah
 - 065 Ketatalaksanaan
 - 065 .1 Tata Naskah Dinas
 - 065 .2 Stempel Dinas dan Stempel Jabatan
 - 065 .3 Papan Nama Instansi Pemerintah / Non Pemerintah

- 065 .4 Alamat-Alamat Kantor dan Pejabat
- 065 .5 Ketentuan Pakaian Dinas dan Atribut
- 066 Tata Hubungan Kerja
- 067 Standart Operasional Prosedur
- 068 Evaluasi dan Laporan Ketatalaksanaan
- 069 Analisis Jabatan
- 069 .1 Pengukuran / Penilaian Beban Kerja Jabatan Struktural dan Fungsional
- 069 .2 Uraian Jabatan
- 070 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
- 071 Riset Meliputi Perijinan Bagi Peneliti, Riset Design, Pembahasan Sampai Dengan Laporan Akhir Riset
- 072 Pengembangan
- 072 .1 Krenova (Kreativitas dan Inovasi masyarakat)
- 072 .2 SINAS (Sisitem Inovasi Nasional)
- 072 .3 SIDA (Sistem Inovasi Daerah) Meliputi Cluster, Kab/ Kota, Desa Inovatif
- 072 .4 Inkubator Teknologi dan Bisnis
- 072 .5 Pameran Produk Inovasi / Ristek
- 072 .6 BTC (Bisnis Teknologi Center)
- 072 .7 Rapterk (Penerapan Iptek)
- 072 .8 HKI (Fasilitas Hak Kekayaan Intelektual)
- 073 Kajian
- 073 .1 Kajian Strategi/Diskusi / Forum Group Discussion (FGD)
- 073 .2 Seminar
- 073 .3 Workshop
- 073 .4 Rapat Koordinasi / Rapat Teknis
- 073 .5 Lokakarya
- 073 .6 Diseminasi/Sosialisasi Hasil Penelitian
- 074 Kerjasama Penelitian
- 074 .1 Instansi Pemerintah Pusat Daerah
- 074 .2 Perguruan Tinggi Negeri/Swasta
- 074 .3 Lembaga Swasta Nasional, Lembaga Swadaya Masyarakat
- 074 .4 Lembaga Internasional
- 075 Perekayasa
- 076 Jarlitbang (Jaringan Penelitian dan Pengembangan)
- 077 Publikasi Ilmiah
- 077 .1 Jurnal Ilmiah
- 080 KONPERENSI / RAPAT KOORDINASI
- 081 Gubernur
- 082 Bupati / Walikota
- 083 Komponen Eselon Lainnya (Termasuk Pimpinan SKPD)
- 084 Instansi Lainnya (di Luar Kemendagri)
- 085 Internasional di Dalam Negeri
- 086 Internasional di Luar Negeri
- 090 PERJALANAN DINAS
- 091 Perjalanan Presiden / Wakil Presiden ke Daerah
- 092 Perjalanan Menteri ke Daerah

- 093 Perjalanan Pejabat Tinggi (Pejabat Eselon I)
- 094 Perjalanan PNS, Meliputi Surat Perintah Tugas (SPT) dan Surat Tugas
- 095 Perjalanan Tamu Asing ke Daerah
- 096 Perjalanan Presiden / Wakil Presiden ke Luar Negeri
- 097 Perjalanan Menteri ke Luar Negeri
- 098 Perjalanan Pejabat Tinggi ke Luar Negeri
- 099 Perjalanan Pegawai ke Luar Negeri

- 100 PEMERINTAHAN
- 110 PEMERINTAHAN PUSAT
- 111 Presiden, Meliputi Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan, Sumpah dan Serah Terima Jabatan
 - 111 .1 Pertanggung Jawaban Presiden Kepada MPR
 - 111 .2 Amanat Presiden/Amanat Kenegaraan
- 112 Wakil Presiden, Meliputi Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan, Sumpah dan Serah Terima Jabatan
- 113 Susunan Kabinet
 - 113 .1 Reshuffle
 - 113 .2 Penunjukan Menteri ad Intern
 - 113 .3 Sidang Kabinet, Sidang Stabilitas Ekonomi, lihat 500.1
- 114 Kementerian Dalam Negeri
 - 114 .1 Amanat Menteri Dalam Negeri
- 115 Kementerian Lainnya
- 116 Lembaga Tinggi Negara (DPA, MA, BPK)
- 117 Lembaga Non Kementrian
- 118 Otonomi Daerah
- 190 Kerjasama Antar Kementerian
- 120 PEMERINTAHAN PROVINSI
 - 120 .1 Kebijakan Pemerintah Provinsi
 - 120 .2 Laporan KinerjaPertanggungjawaban Gubernur (LKPJ)
 - 120 .3 Monografi, Tambahkan Kode Wilayah
 - 120 .4 Koordinasi
 - 120 .41 Satuan Kerja Perangkat Daerah
 - 120 .42 Istansi Vertikal
 - 120 .43 Kerjasama Antar Provinsi/Daerah, dan Luar Negeri
- 121 Gubernur, Meliputi Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan, Sumpah dan Serah Terima Jabatan dan sebagainya
- 122 Wakil Gubernur, Meliputi Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan, Sumpah dan Serah Terima Jabatan dan sebagainya
- 123 Sekretaris Daerah, Meliputi Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan, Pemberhentian, Serah Terima Jabatan dan sebagainya

- 124 Badan-Badan Pertimbangan Daerah, meliputi Muspida
- 125 Pembentukan/Pemekaran
 - 125 .1 Pembentukan Daerah Otonom
 - 125 .2 Pembentukan Wilayah
 - 125 .3 Perubahan Batas Wilayah

125 .4	Pemekaran Wilayah
125 .5	Permasalahan Batas Wilayah
125 .6	Pemindahan Ibukota Provinsi
125 .7	Pemberian dan Penggantian Nama Kota, Daerah, Jalan
126	Pembagian Wilayah
127	Penyerahan Urusan
130	PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA
130 .1	Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota
130 .2	Laporan Kinerja Pertanggungjawaban Bupati/walikota (LKPJ)
130 .3	Monografi
130 .4	Koordinasi
130 .41	Satuan Kerja Perangkat Daerah
130 .42	Instansi Vertikal
130 .43	Kerjasama Antar Provinsi/Daerah, dan Luar Negeri (Sister City)
131	Bupati/Walikota, Meliputi Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan, Sumpah dan Serah Terima Jabatan dan sebagainya
132	Wakil Bupati/Wakil Walikota, Meliputi Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan, Sumpah dan Serah Terima Jabatan dan sebagainya
133	Sekretaris Daerah, Meliputi Pencalonan, Serah Terima Jabatan
134	Forum Koordinasi Pemerintah di Daerah, Meliputi Muspida
135	Pembentukan Daerah
135 .1	Pembentukan Daerah Otonom
135 .2	Pembentukan Wilayah
135 .3	Perubahan Batas Wilayah
135 .4	Pemekaran Wilayah
135 .5	Permasalahan Batas Wilayah
135 .6	Pemindahan Ibukota Kabupaten/Kota
135 .7	Pemberian dan Penggantian Nama Kota, Daerah, Jalan
136	Pembagian Wilayah
137	Penyerahan Urusan
138	Pemerintah Wilayah Kecamatan
138 .1	Pembentukan Kecamatan
138 .2	Pemekaran Kecamatan
138 .3	Perluasan/Perubahan Batas Wilayah Kecamatan
138 .4	Pemindahan Ibukota Kecamatan
138 .5	Laporan Kecamatan
140	PEMERINTAHAN DESA/KELURAHAN
141	Pamong Desa, Meliputi Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pemberhentian Sementara, Pelantikan, Serah Terima, Penghasilan dan sebagainya
142	Anggaran Desa
142 .1	Dana Desa
142 .2	Alokasi Dana Desa
142 .3	APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa)
143	Kekayaan Desa : Bando Desa, Tanah Bengkok dll
144	Lembaga Tk. Desa: Rembug Desa, Badan Permusyawaratan Desa, LKMD

145	Administrasi Desa/Kelurahan : Monografi, Peta Rupa Bumi dll
146	Kewilayahan
146 .1	Pembentukan Desa/Kelurahan
146 .2	Pemekaran Desa/Kelurahan
146 .3	Perubahan dan Perluasan Batas Wilayah Desa/Kelurahan
146 .4	Perubahan Nama Desa/Kelurahan
146 .5	Permasalahan Batas Desa/Kelurahan
146 .6	Penyatuan Desa/Kelurahan
146 .7	Penghapusan Desa/Kelurahan
147	RT-RW
150	LEGISLATIF MPR/DPR/DPD
151	Keanggotaan MPR
151 .1	Pencalonan
151 .2	Pengangkatan dan Pengambilan Sumpah
151 .3	Pemberhentian
151 .31	Recall
151 .32	Meninggal
151 .4	Pelangaran
151 .5	Pergantian Antar Waktu
152	Keanggotaan DPR
152 .1	Pencalonan
152 .2	Pengangkatan dan Pengambilan Sumpah
152 .3	Pemberhentian
152 .31	Recall
152 .32	Meninggal
152 .4	Pelangaran
152 .5	Pergantian Antar Waktu
153	Keanggotaan DPD
153 .1	Pencalonan
153 .2	Pengangkatan dan Pengambilan Sumpah
154	Persidangan
155	Kesejahteraan
155 .1	Keuangan
155 .2	Penghargaan
156	Hak
157	Jawaban Pemerintah
158	Peninjauan/Kunjungan Lapangan
159	Kunjungan Kerja/Study Banding/Konsultasi
160	DPRD PROVINSI
161	Keanggotaan
161 .1	Pencalonan
161 .2	Pengangkatan dan Pengambilan Sumpah
161 .3	Pelanggaran
161 .4	Pemberhentian Antar Waktu
161 .41	Meninggal Dunia
161 .42	Mengundurkan Diri
161 .43	Diberhentikan
161 .5	Alat Kelengkapan desa

- 161 .51 Pimpinan
- 161 .52 Badan Musyawarah
- 161 .53 Komisi
- 161 .54 Badan Legislasi Daerah
- 161 .55 Badan Anggaran
- 161 .56 Badan Kehormatan
- 161 .57 Alat Kelengkapan Lain (Pansus)
- 162 Persidangan
- 162 .1 Rapat-Rapat
- 162 .11 Rapat Paripurna, Rapat Paripurna Istimewa
- 162 .12 Rapat Pimpinan DPRD
- 162 .13 Rapat Badan Musyawarah, Rapat Badan Anggaran, Rapat Badan Legislasi, Rapat Badan Kehormatan, Rapat Pansus
- 162 .14 Rapat Komisi, Rapat Gabungan Komisi, Rapat Konsultasi
- 162 .15 Rapat Kerja, Rapat Dengar Pendapat, Rapat Dengar Pendapat Umum, Rapat Pandangan Umum
- 162 .16 Rapat Fraksi
- 162 .2 Fraksi
- 162 .3 Tata tertib kantor, termasuk pengaturan hari dan jam kerja pegawai
- 162 .4 Kode Etik
- 162 .5 Reses
- 162 .6 Peninjauan/Kunjungan Lapangan
- 162 .7 Kunjungan Kerja/Study Banding/Konsultasi
- 163 Kesejahteraan
- 163 .1 Keuangan
- 163 .2 Penghargaan
- 164 Hak
- 170 DPRD KABUPATEN/KOTA
- 171 Keanggotaan
- 171 .1 Pencalonan
- 171 .2 Pengangkatan dan Pengambilan Sumpah
- 171 .3 Pelanggaran
- 171 .4 Pemberhentian Antar Waktu
- 171 .41 Meninggal Dunia
- 171 .42 Mengundurkan Diri
- 171 .43 Diberhentikan
- 171 .5 Alat Kelengkapan Dewan
- 171 .51 Pimpinan
- 171 .52 Badan Musyawarah
- 171 .53 Komisi
- 171 .54 Badan Pembentuk Peraturan
- 171 .55 Badan Anggaran
- 171 .56 Badan Kehormatan
- 171 .57 Alat Kelengkapan Lain (Pansus)
- 172 Persidangan
- 172 .1 Rapat-Rapat
- 172 .11 Rapat Paripurna, Rapat Paripurna Istimewa

- 172 .12 Rapat Pimpinan DPRD
- 172 .13 Rapat Badan Musyawarah, Rapat Badan Anggaran, Rapat Badan
Legislasi, Rapat Badan Kehormatan, Rapat Pansus
- 172 .14 Rapat Komisi, Rapat Gabungan Komisi, Rapat Konsultasi
- 172 .15 Rapat Kerja, Rapat Dengar Pendapat, Rapat Dengar Pendapat
Umum, Rapat Pandangan Umum
- 172 .16 Rapat Fraksi
- 172 .2 Fraksi
- 172 .3 Tata tertib kantor, termasuk pengaturan hari dan jam kerja pegawai

- 172 .4 Kode Etik
- 172 .5 Reses
- 172 .6 Peninjauan/Kunjungan Lapangan
- 172 .7 Kunjungan Kerja/Study Banding/Konsultasi
- 173 Kesejahteraan
- 173 .1 Keuangan
- 173 .2 Penghargaan
- 174 Hak
- 180 HUKUM
- 180 .1 Konstitusi
- 180 .11 Dasar Negara
- 180 .12 Undang Undang Dasar
- 180 .13 Undang Undang
- 180 .14 Peraturan Pemerintah
- 180 .15 Keppres/Perpres/Inpres
- 180 .16 Kepmen/Permen/Inmen
- 180 .17 Perundangan Tingkat Provinsi Meliputi Perda,
KepGub/PerGub/InGub
- 180 .18 Perundangan Tingkat Kabupaten/Kota Meliputi Perda,
KepBup/KepWal, PerBup/PerWal
- 180 .19 Perundangan Tk. Desa Meliputi Peraturan Desa, Keputusan Kepala
Desa
- 180 .2 Tap MPR
- 180 .3 Konversi
- 181 Perdata
- 181 .1 Tanah
- 181 .2 Rumah
- 181 .3 Utang/Piutang
- 181 .31 Gadai
- 181 .32 Hipotik
- 181 .4 Notariat
- 182 Pidana
- 182 .1 Tindak Pidana Umum
- 182 .2 Tindak Pidana Khusus
- 183 Peradilan
- 183 .1 Jenis-Jenis Peradilan
- 183 .11 Peradilan Umum
- 183 .111 Peradilan Negeri Tingkat Pertama

183 .112 Peradilan Tinggi
 183 .113 Mahkamah Agung
 183 .12 Peradilan Agama Islam
 183 .121 Pengadilan Agama Islam Tingkat Pertama
 183 .122 Pengadilan Tinggi Agama Islam
 183 .123 Mahkamah Islam Agung
 183 .13 Peradilan Militer
 183 .131 Mahkamah Militer Tingkat Pertama
 183 .132 Mahkamah Militer Tinggi
 183 .133 Mahkamah Militer Agung
 183 .14 Peradilan Tata Usaha Negara
 183 .141 Pengadilan Tata Usaha Tingkat Pertama
 183 .142 Pengadilan Tinggi Tata Usaha
 183 .143 Mahkamah Tata Usaha Agung
 183 .15 Peradilan Hak Asasi Manusia
 183 .16 Peradilan Tindak Pidana Korupsi
 183 .17 Mahkamah Konstitusi
 183 .18 Komisi Yudisial
 183 .19 Ombustmen
 183 .2 Upaya Hukum
 183 .21 Banding
 183 .22 Kasasi
 183 .23 Derden Verset
 183 .24 Peninjauan Kembali
 183 .25 Grasi, Amnesti, Abolisi
 183 .3 Eksekusi
 183 .4 Pembinaan Hukum, Meliputi Kadarkum
 183 .5 Bantuan Hukum, Meliputi LBH
 184 Hukum Internasional
 185 Imigrasi
 185 .1 Visa
 185 .2 Paspor
 185 .3 Exit
 185 .4 Reentry
 185 .5 Lintas Batas/Batas Antar Negara
 186 Kepenjaraan
 186 .1 Registrasi Narapidana
 186 .2 Pembinaan Narapidana
 186 .3 Pembebasan Narapidana
 186 .4 Tahanan Titipan
 187 Kejaksaan
 187 .1 Penuntutan Umum
 187 .2 Penuntutan Khusus
 188 Hukum Adat
 190 HUBUNGAN LUAR NEGERI
 191 Perwakilan Asing
 192 Tamu Negara
 193 Kerjasama Diplomatik Dengan Negara Asing

194	Perwakilan RI di Luar Negeri
195	PBB
196	Laporan Luar Negeri
200	POLITIK
201	Perencanaan dan Program Pembinaan Politik Luar Negeri
201 .1	Pembinaan dan Pemahaman Ideologi Negara
201 .2	Kesatuan Bangsa
201 .3	Pelaksanaan Pembinaan Politik Dalam Negeri Termasuk Laporannya
201 .4	Keadaan Politik Luar Negeri
201 .5	Evaluasi dan Pengawasan Pembinaan Ipoleksosbud Hankam
201 .6	Orde Baru
201 .7	Orde Reformasi
210	KEPARTAIAN
211	Partai Politik
211 .1	Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PARPOL
211 .2	Program Kerja, Data Kegiatan PARPOL
211 .3	Pembinaan PARPOL
211 .4	Hasil Munas/Musda PARPOL
211 .5	Struktur/Kepengurusan, Pengkaderan dan Keanggotaan PARPOL
211 .6	Data Inventaris dan Keuangan PARPOL
212	Partai/Organisasi Terlarang
212 .1	Keputusan Pembubaran Partai/Organisasi Terlarang
212 .2	Daftar dan Data Pengurus Anggota Partai/Organisasi Terlarang
212 .3	Ijin Meninggalkan Tempat/Domisili Bagi Anggota Partai/Organisasi Terlarang
212 .4	Daftar Berkala Mengenai Keanggotaan Anggota Partai/Organisasi Terlarang
212 .5	Laporan Umum Mengenai Keadaan Anggota Partai/Organisasi Terlarang
220	ORGANISASI KEMASYARAKATAN
221	Pembentukan Organisasi
221 .1	Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga
221 .2	Kepengurusan dan Daftar Anggota Organisasi
221 .3	Program Kerja Organisasi
221 .4	Munas/Musda Provinsi dan Kabupaten/Kota
222	Pembinaan Organisasi
222 .1	Kegiatan Organisasi dan Pelaporannya
222 .2	Daftar Inventaris Kekayaan Organisasi
223	Pemberdayaan Forum Bentuk Pemerintah
223 .1	FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama)
223 .2	FPBI (Forum Persatuan Bangsa Indonesia)
223 .3	FKDM (Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat)
230	ORGANISASI PROFESI DAN FUNGSIONAL
231	Pembentukan Organisasi

- 231 .1 Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga
- 231 .2 Kepengurusan dan Daftar Anggota Organisasi
- 231 .3 Program Kerja Organisasi
- 231 .4 Munas/Musda Provinsi dan Kabupaten/Kota
- 232 Pembinaan Organisasi
- 232 .1 Kegiatan Organisasi dan Pelaporannya
- 232 .2 Daftar Inventaris Kekayaan Organisasi
- 240 ORGANISASI PEMUDA
- 241 Pembentukan Organisasi
- 241 .1 Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga
- 241 .2 Kepengurusan dan Daftar Anggota Organisasi
- 241 .3 Program Kerja Organisasi
- 241 .4 Munas/Musda Provinsi dan Kabupaten/Kota
- 242 Pembinaan Organisasi
- 242 .1 Kegiatan Organisasi dan Pelaporannya
- 242 .2 Daftar Inventaris Kekayaan Organisasi
- 250 ORGANISASI BURUH, TANI DAN NELAYAN
- 251 Pembentukan Organisasi
- 251 .1 Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga
- 251 .2 Kepengurusan dan Daftar Anggota Organisasi
- 251 .3 Program Kerja Organisasi
- 251 .4 Munas/Musda Provinsi dan Kabupaten/Kota
- 252 Pembinaan Organisasi
- 252 .1 Kegiatan Organisasi dan Pelaporannya
- 252 .2 Daftar Inventaris Kekayaan Organisasi
- 260 ORGANISASI WANITA
- 261 Pembentukan Organisasi
- 261 .1 Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga
- 261 .2 Kepengurusan dan Daftar Anggota Organisasi
- 261 .3 Program Kerja Organisasi
- 261 .4 Munas/Musda Provinsi dan Kabupaten/Kota
- 262 Pembinaan Organisasi
- 262 .1 Kegiatan Organisasi dan Pelaporannya
- 262 .2 Daftar Inventaris Kekayaan Organisasi
- 270 PEMILU (PEMILIHAN UMUM), PILKADA (PEMILIHAN KEPALA DAERAH)
- 271 Pencalonan
- 271 .1 Anggota DPR/DPRDI/DPRD II/DPD
- 271 .11 Pendaftaran
- 271 .12 Verifikasi Persyaratan Administrasi
- 271 .13 Hasil Verifikasi Persyaratan Administrasi
- 271 .14 Nomor Urut/Tanda Gambar
- 271 .15 Penetapan Calon
- 271 .2 Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
- 271 .21 Pendaftaran
- 271 .22 Verifikasi Persyaratan Administrasi
- 271 .23 Hasil Verifikasi Persyaratan Administrasi
- 271 .24 Nomor Urut/Tanda Gambar

271	.25	Penetapan Calon
272		Sosialisasi
272	.1	Petugas
272	.2	Bahan
272	.3	Tempat
273		Kampanye
273	.1	Alat Peraga/Bahan Kampanye
273	.2	Lokasi/Tempat Kampanye
273	.3	Dana Kampanye
273	.4	Laporan Dana Kampanye
273	.5	Tim/Juru Kampanye
273	.6	Pelanggaran Kampanye
274		Penyelenggara
274	.1	KPU (Komisi Pemilihan Umum)
274	.2	PPK (Panitia Pemungutan Kecamatan)
274	.3	PPS (Panitia Pemungutan Suara)
274	.4	KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara)
275		Pemilih
275	.1	Petugas Pemutahiran Daftar Pemilih
275	.2	Daftar Pemilih Sementara
275	.3	Daftar Pemilih Tambahan
275	.4	Daftar Pemilih Tetap
276		Sarana
276	.1	Logistik Pemungutan Suara di TPS (Tempat Pemungutan Suara)
276	.2	Logistik Rekapitulasi Penghitungan Suara
276	.3	Pembiayaan
277		Pemungutan dan Penghitungan Suara
277	.1	Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS
277	.2	Pemungutan dan Penghitungan Suara di PPS
277	.3	Pemungutan dan Penghitungan Suara di PPK
277	.4	Pemungutan dan Penghitungan Suara di KPU Kabupaten
277	.5	Pemungutan dan Penghitungan Suara di KPU Provinsi
277	.6	Pemungutan dan Penghitungan Suara di KPU RI
277	.7	Pemungutan Suara Ulang
277	.8	Penghitungan Suara Ulang
278		Hasil Pemilu/Pilkada
278	.1	Pemilu Legislatif
278	.2	Pemilihan Presiden/Wakil Presiden
278	.3	Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur
278	.4	Pemilihan Bupati/Wakil Bupati
278	.5	Sengketa Perselisihan Hasil Pemilu
279		Penetapan Calon Terpilih
279	.1	Penetapan Anggota DPR/DPRDI/DPRD II/DPD
279	.2	Penetapan Presiden/Wakil Presiden
279	.3	Penetapan Kepala Daerah (Gubernur/Wakil Gubernur dan Bupati/Wakil Bupati)
279	.4	PAW Anggota DPRD
280		Pengawasan Pemilu/Pilkada

281	Petugas
281 .1	Bawaslu Pusat
281 .2	Bawaslu Provinsi
281 .3	Panitia Pengawas Pemilu Tingkat Kabupaten
281 .4	Panitia Pengawas Pemilu Tingkat Kecamatan
281 .5	Panitia Pengawas Pemilu Tingkat Desa/Kelurahan
282	Pelanggaran
283	-
300	KEAMANAN DA KETERTIBAN UMUM
300 .1	Kebijakan Pemerintah Mengenai Situasi dan Kondisi Keamanan
300 .2	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
300 .3	Pembinaan dan Pengaturan Mengenai Larangan
300 .4	Program Kerja Serta Tata Cara Penanggulangan Keamanan
301	Koordinasi dan Kerjasama Keamanan dan Ketertiban Umum (Trantibum)
302	Pembinaan Ketahanan/Stabilitas Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan
303	Pengawasan Trantibum
304	Penegakan Pelaksanaan Perda
305	Pembinaan/Penyuluhan Pelanggaran Perda
306	Penanganan Konflik Sosial
307	Patroli Wilayah
308	Laporan Kunjungan VIP, VVIP, Tamu Asing
308 .1	Pengamanan
308 .2	Pengawasan
309	Pemberitahuan Keadaan Bahaya dan Jam Malam Meliputi Pemberitahuan, Ketentuan Pelaksanaan dan Pengawasan
310	PERTAHANAN
311	Darat
312	Laut
313	Udara
314	Ketahanan Bangsa
315	Ketahanan Ekonomi
316	Ketahanan Seni dan Budaya, Agama dan Kemasyarakatan
320	KEMILITERAN/TNI
321	Latihan Militer
322	Wajib Militer
323	Operasi Militer
324	Kekaryaannya TNI
325	Kemanunggalan TNI Dengan Rakyat
330	KEAMANAN
331	Kepolisian
331 .1	Polisi Pamong Praja
332	Huru-hara/Demonstrasi
333	Senjata Api/Tajam
334	Bahan Peledak
335	Perjudian

336	Surat-surat Kaleng
337	Pengaduan Masyarakat
338	Himbauan Atau Larangan
340	PERLINDUNGAN MASYARAKAT (LINMAS)
340 .1	Kebijakan Pemerintah Pembentukan Linmas
341	Pembinaan dan Diklat
341 .1	Pengangkatan/Pemberhentian Anggota Linmas
341 .2	Pendidikan/Latihan Linmas
341 .3	Pelatihan PAM Swakarsa
341 .4	Pendidikan/Latihan MENWA
342	Pengarahan dan Pengendalian Linmas
343	Kesejahteraan Bagi Anggota Linmas
343 .1	Pembentukan Organisasi Bagi Anggota Linmas
343 .2	Bantuan Modal Usaha Bagi Anggota Linmas
343 .3	Santunan Uang Duka Bagi Anggota Linmas
343 .4	Penghargaan Bagi Anggota Linmas
344	Data Linmas, MENWA, PAM Swakarsa
344 .1	Linmas Lanjut Usia
345	Orientasi Kesadaran Bela Negara
346	Kegiatan Pelaksanaan Linmas
350	KEJAHATAN
351	Makar/Pemberontakan/Terrorisme
352	Pembunuhan
353	Penganiayaan/Pencurian/Perampasan
354	Subversi/Penyeludupan/Narkotika
355	Penipuan dan Pemalsuan
356	Korupsi/Penyelewengan/Penyalahgunaan Jabatan
357	Kekerasan Pada Perempuan dan Anak
357 .1	Pelaporan
357 .2	Penanganan Korban
358	Kenakalan
359	Kejahatan Lainnya (Trafficking, KDRT, Hipnotis, dll)
360	BENCANA
360 .1	Prabencana
360 .11	Situasi Tidak Bencana
	Meliputi Perencanaan, Pencegahan, Diklat dan Hal Lain Dalam
	Rangka Penanggulangan Bencana
360 .12	Situasi Potensi Bencana
	Meliputi Kesiapsiagaan, Peringatan Dini dan Mitigasi
360 .2	Tanggap Darurat
	Meliputi Pengkajian Lokasi, Kerusakan dan Sumber Daya,
	Penentuan Status, Penyelamatan dan Evakuasi serta Hal Lain
	Menyangkut Tanggap Darurat Bencana
360 .1	Pasca Bencana
	Meliputi Rehabilitasi dan Rekonstruksi
361	Gunung Berapi/Gempa/Tsunami
362	Banjir/Tanah Longsor
363	Angin Topan

364	Kebakaran
364 .1	Pemadam Kebakaran
365	Kekeringan
366	Posko Bencana
367	Koordinasi/Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana
368	MoU Pemerintah Pusat BNPB
370	KECELAKAAN
371	Latihan SAR
372	Latihan Ketrampilan Penyelamatan di Air dan Menyelam
373	Pelatihan Manajemen Bagi Pejabat
374	Satkorlak dan Satlak PBP
375	Pelatihan Kemampuan Pusdalop Bagi Aparat PBP
376	Latihan Ketrampilan Pemadam Kebakaran
377	Kecelakaan Darat, Laut, Udara
378	Investigasi/Penyelidikan Kecelakaan
379	Asuransi Kecelakaan
380	PENDAMPINGAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI
381	Perencanaan
381 .1	Perencanaan Teknis
381 .2	Rekomendasi
382	Bantuan Bencana
383	Penanggulangan Bencana Dengan Pihak Lain
384	Sarana Prasarana Rehabilitasi dan Rekonstruksi
385	PUSDALOPS
386	Kunjungan Lapangan
387	Relawan
388	Laporan Bencana
390	KERJASAMA BPBD DENGAN INSTANSI LAIN
391	Instansi Pemerintah Pusat
392	Instansi Pemerintah di Daerah
393	Lembaga Internasional
394	Lembaga Non Pemerintah Nasional
400	KESEJAHTERAAN RAKYAT
401	Kebijakan dan Program Pemerintah Untuk Kesejahteraan Rakyat
410	PEMBANGUNAN DESA/KELURAHAN
411	Gotong Royong
411 .1	Swadaya Gotong Royong
411 .11	Pembinaan
411 .12	Pungutan
411 .2	Lembaga Sosial Desa (LSD)
411 .3	Latihan Kerja Masyarakat
411 .4	Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)
411 .5	Penyuluhan Masyarakat Desa
411 .6	Kelembagaan Desa
411 .7	Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM)
412	Perekonomian Desa

- 412 .1 Produksi Desa
- 412 .11 Pengolahan
- 412 .12 Pemasaran
- 412 .2 Pembiayaan Pembangunan Desa
- 412 .21 Inventarisasi Data
- 412 .22 Petunjuk/ Pembinaan Pelaksanaan
- 412 .23 Pelaksanaan dan Perkembangan Pembangunan
- 412 .24 Bantuan/ Stimulasi
- 412 .25 Perkreditan Desa
- 412 .26 Pelaporan
- 412 .27 Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MP)
- 412 .28 Sistem Keuangan Desa
- 412 .3 Koperasi Desa
- 412 .31 Badan Usaha Unit Desa (BUUD)
- 412 .32 Koperasi Unit Desa (KUD)
- 413 Sarana dan Prasarana Desa
- 413 .1 Pemukiman Kembali Penduduk
- 413 .2 Pemugaran Perumahan dan Lingkungan Desa
- 413 .3 Perbaikan Kampung
- 413 .4 Teknologi Tepat Guna (TTG)
- 414 Pengembangan Desa
- 414 .1 Perlombaan Desa dan Kelurahan
- 414 .11 Pedoman
- 414 .12 Penilaian
- 414 .13 Kejuaraan
- 414 .2 Profil Desa
- 414 .3 Sistem Informasi Desa
- 415 Koordinasi
- 415 .1 Kerjasama
- 415 .11 Luar Negeri
- 415 .12 Perguruan Tinggi
- 415 .13 Kementerian/Lembaga Pemerintah
- 415 .14 Lembaga Lainnya
- 420 PENDIDIKAN
- 420 .1 Kebijakan dan Program Pemerintah Untuk Pendidikan
- 420 .2 Kalender Pendidikan
- 420 .3 Perijinan Bidang Pendidikan
- 420 .4 Pendidikan Karakter Bangsa, Wawasan Kebangsaan, Jiwa Nasionalisme dsb
- 420 .5 Pendidikan Kemasyarakatan
- 421 Sekolah (Termasuk Akreditasi)
- 421 .1 Pra Sekolah (PAUD, Playgroup)
- 421 .2 Sekolah Dasar
- 421 .3 Sekolah Menengah
- 421 .4 Sekolah Kejuruan
- 421 .5 Perguruan Tinggi (Sekolah Tinggi, Akademi, Universitas, dll)
- 421 .6 Kegiatan Sekolah Meliputi Dies Natalis, Lustrum

- 421 .7 Kegiatan Pelajar Diantaranya Reuni, Darmawisata, Widyawisata, Lomba-lomba (KS, Olimpiade Sains, Olimpiade Olah Raga dan Sains), Pelajar Teladan, Pertukaran Pelajar
- 421 .8 Sekolah Pendidikan Luar Biasa
- 421 .9 Pendidikan Luar Sekolah/Pemberantasan Buta Huruf
- 422 Administrasi Sekolah
- 422 .1 Persyaratan Masuk Sekolah, Testing, Ujian, OSPEK
- 422 .2 Tahun Pelajaran
- 422 .3 Hari Libur
- 422 .4 Uang Sekolah, Diantaranya SPP, SPI
- 422 .5 Bea Siswa
- 422 .6 Penghargaan Siswa Berprestasi
- 422 .7 Ijazah, Sertifikat
- 422 .8 Bantuan Pendidikan : Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Bantuan Khusus Murid (BKML Bantuan Siswa Miskin (BSM)
- 423 Metode Belajar
- 423 .1 Kuliah
- 423 .2 Ceramah, Simposium, Seminar
- 423 .3 Diskusi
- 423 .4 Kuliah Lapangan, KKN, Magang/Praktek/PKL
- 423 .5 Kurikulum.
- 423 .6 Karya Tulis, Karya Ilmiah
- 423 .7 Ujian
- 423 .8 Prakerin
- 424 Tenaga Pengajar (Guru, Dosen, Guru/ Dosen Teladan, Guru/ Dosen Berprestasi/ Nara Sumber)
- 424 .1 Pertukaran Guru ke Luar Negeri
- 424 .2 Sertifikasi Guru
- 425 Sarana Pendidikan
- 425 .1 Bangunan Pendidikan
- 425 .11 Gedung Sekolah
- 425 .12 Kampus
- 425 .13 Pusat Kegiatan
- 425 .14 Perpustakaan
- 425 .15 Laboratorium
- 425 .2 Buku
- 425 .3 Perlengkapan Pendidikan
- 425 .4 Sistem Informasi Pendidikan
- 425 .5 Pengembangan Teknologi Informasi Komunikasi Pendidikan
- 426 Keolahragaan
- 426 .1 Pembinaan Keolahragaan
- 426 .11 Olah Raga Prestasi (PON, Sea Games, Kejurnas, Olympiade)
- 426 .12 Olah Raga Pendidikan (POPDA SD, Porseni dll)
- 426 .13 Olah Raga Rekreasi /Massal (Senam, Sepeda Santai, Olah Raga Tradisional)
- 426 .14 Iptek dan Industri Olah Raga
- 426 .15 Sarana Prasarana Keolahragaan
- 426 .2 Cabang Olah Raga

- 426 .3 Kemitraan Olah Raga
- 426 .4 Penghargaan Prestasi Olah Raga
- 427 Kepemudaan
- 427 .1 Pertukaran Pemuda
- 427 .2 Paskibraka
- 427 .3 Sarana Prasarana Kepemudaan, Meliputi Sarana Kegiatan Remaja :
Gelanggang Remaja
- 427 .4 Kemitraan Pemuda
- 427 .5 Karang Taruna
- 428 Kepramukaan/ Kepanduan
- 430 KEBUDAYAAN
- 430 .1 Kebijakan dan Program Pemerintah untuk kebudayaan
- 430 .2 Pembinaan Bidang Kebudayaan
- 431 Kesenian
- 431 .1 Cabang Kesenian (Seni Pewayangan, Seni Tari, Seni Musik, Seni Rupa, Seni Lukis dll)
- 431 .2 Sarana
- 431 .21 Gedung Kesenian
- 431 .22 Padepokan
- 431 .23 Lembaga Adat
- 431 .24 Kegiatan Adat/ Tradisi
- 431 .3 Usaha Pertunjukan, Hiburan, Kesenangan : Festival, Pentas Seni
- 432 Kepurbakalan
- 432 .1 Museum
- 432 .2 Peninggalan Kuno
- 432 .21 Candi, Termasuk Pemugaran
- 432 .22 Benda
- 433 Sejarah
- 434 Bahasa
- 435 Penghayat Kepercayaan
- 440 KESEHATAN
- 440 .1 Kebijakan dan Program Pemerintah Untuk Kesehatan
- 440 .2 Perijinan Bidang Kesehatan
- 441 Pembinaan Kesehatan
- 441 .1 Gigi
- 441 .2 Mata
- 441 .3 Jiwa
- 441 .4 Kanker
- 441 .5 UKS (Usaha Kesehatan Sekolah)
- 441 .6 Perawatan
- 441 .7 Kesehatan Masyarakat Meliputi PKM, Pemberdayaan Kesehatan Masyarakat Melalui Media PKK, Posyandu,dsb
- 441 .8 Kesehatan Ibu dan Anak
- 441 .9 JPSBK (Jaminan Pengaman Sosial Bidang Kesehatan)
- 441 .91 JAMKESMAS/JAMKESDA/JAMPERSAL
- 441 .92 Jaminan Lainnya
- 441 .93 Klaim Kesehatan
- 441 .94 Jaminan Lainnya

- 442 Obat-obatan
- 442 .1 Pengadaan
- 442 .2 Pemeriksaan Obat
- 442 .3 Penyimpanan Obat
- 442 .4 Distribusi Obat
- 442 .5 Pengawasan Obat
- 442 .51 Obat Generik
- 442 .52 Obat Terlarang
- 442 .53 Pemalsuan Obat
- 443 Pemberantasan dan Pencegahan Penyakit
- 443 .1 Pencegahan Penyakit
- 443 .2 Pemberantasan Penyakit Menular Langsung (P.2.M.L)
- 443 .21 Kusta
- 443 .22 Kelamin, HIV, AIDS, IM.S
- 443 .23 Frambusia
- 443 .24 T.B.C
- 443 .25 Kholera
- 443 .26 SARS, dan Jenis Penyakit Lainnya
- 443 .3 Pemberantasan Penyakit Menular Sumber Binatang (P2B)
- 443 .31 Malaria
- 443 .32 Dengue Haemorrhagic Fever (DHF), DBD
- 443 .33 Filaria
- 443 .34 Serangga
- 443 .35 Rabies
- 443 .36 Antrak
- 443 .37 Leptosirosis
- 443 .38 Chikungunya
- 443 .39 Penyakit Lainnya
- 443 .4 Pemberantasan dan Pencegahan Penyakit Tidak Menular
- 443 .41 A.Pektoris
- 443 .42 IMA (Irama Mastcmik Akut)
- 443 .43 Hipertensi
- 443 .44 Stroke
- 443 .45 Diabetes Melitus
- 443 .46 Pemberantasan dan Pencegahan Penyakit CA. Serviks
- 443 .47 Pemberantasan dan Pencegahan Penyakit CA. Mammae
- 443 .48 Pemberantasan dan Pencegahan Penyakit CA. Hepar
- 443 .49 Pemberantasan dan Pencegahan Penyakit CA Paru, dan Penyakit Lainnya
- 443 .5 Epidemiology dan Karantina (Epidka)
- 443 .51 Imunisasi
- 443 .52 Surveilanse
- 443 .53 Pestisida
- 443 .54 Pencemaran Udara
- 443 .55 Jamban Keluarga
- 443 .56 Kesehatan Institusi
- 443 .6 Higiene Sanitasi
- 443 .61 Tempat-tempat Pembuatan dan Penjualan Makanan Minuman

- 443 .62 Sarana Air Minum
- 443 .63 Pestisida, Insektisida
- 443 .64 Pencemaran
- 443 .65 Jamban Keluarga, Sanitasi Rumah Tangga
- 443 .66 Kesehatan Institusi, Misal : Poskestren, Sanitasi Masjid dll
- 443 .67 Higiene Sanitasi CA. Mammae
- 443 .68 Higiene Sanitasi CA. Hepar
- 443 .69 Higiene Sanitasi CA. Paru
- 443 .7 Kejadian Khusus
- 443 .71 Dekompensasiokordosis (Serangan Jantung)
- 443 .72 Asma
- 443 .73 Psikosis
- 443 .74 PPOM
- 443 .75 Kecelakaan Lalu Lintas
- 443 .76 Kejadian Luar Biasa (KLB)
- 444 Gizi dan Pengawasan Makanan
- 444 .1 Kekurangan Makanan
- 444 .2 Bahaya Kelaparan, Busung Lapar, Gizi Buruk
- 444 .3 Keracunan Makanan
- 444 .4 Menu Makanan Rakyat
- 444 .5 Gondok Endemik (GAKI)
- 445 RSU, RSJ, RS Khusus
- 445 .1 Pelayanan Medis (Termasuk Surat Keterangan Berkaitan Dengan Kondisi Pasien, Visum, Sertifikat Medis Penyebab Kematian)
- 445 .11 Rawat Inap
- 445 .12 Rawat Jalan
- 445 .121 Kemoterapi
- 445 .122 Fisioterapi
- 445 .123 Endoskopi
- 445 .124 Rawat Jalan Lainnya
- 445 .13 IGD
- 445 .14 IBS
- 445 .15 ICU
- 445 .16 MCU (Medical Check Up)
- 445 .2 Penunjang
- 445 .21 Penunjang Medis
- 445 .211 Farmasi
- 445 .212 Rekam Medik
- 445 .213 Radiologi
- 445 .214 Gizi
- 445 .215 Laboratorium Klinik
- 445 .216 Laboratorium Patologi Anatomi, Forensik
- 445 .217 Bank Darah Rumah Sakit
- 445 .22 Penunjang Non Medis
- 445 .221 Sanitasi Rumah Sakit
- 445 .222 CSSD / Laundry
- 445 .223 IPAL
- 445 .224 PSRS

- 445 .225 Electrical Mechanic (genset/Kelistrikan)
- 445 .226 Pemulasaran Jenazah
- 445 .3 Keperawatan
- 445 .4 Komite Medik
- 445 .5 SPI (Satuan Pengawas Internal)
- 445 .6 Mutu Rumah Sakit
- 445 .61 Akreditasi
- 445 .62 ISO
- 445 .63 PSBH (Problem Solving for Better Hospital)
- 445 .64 IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)
- 445 .7 IPAL (Instalasi Pengolahan Limbah)
- 445 .8 Promosi Layanan Kesehatan
- 445 .9 Kasus Hukum Rumah Sakit
- 446 Tenaga Medis
- 446 .1 Perencanaan Tenaga Medis
- 446 .2 Pendayagunaan Tenaga Medis
- 446 .21 Perijinan untuk Tenaga Medis
- 446 .22 Kegiatan Bhakti Sosial Tenaga Medis□
- 446 .23 TKHI (Tenaga Kesehatan Haji Indonesia)
- 446 .3 Diklat Tenaga Kesehatan/ Medis
- 446 .4 Diklat Tenaga Kesehatan/Para Medis
- 446 .5 Pendidikan di Bidang Kesehatan Termasuk Pendidikan Spesialis
- 447 Peralatan Kesehatan
- 447 .1 Standarisasi
- 447 .2 Penyimpanan
- 447 .3 Distribusi
- 447 .4 Kalibrasi
- 448 Pengobatan Alternatif
- 448 .1 Pijat
- 448 .2 Akupuntur
- 448 .3 Jamu dan Herbal
- 448 .4 Dukun
- 449 Lembaga Penyedia Layanan Kesehatan
- 449 .1 PUSKESMAS dan PUSKESMAS Keliling
- 449 .2 Poliklinik dan Balai Kesehatan
- 449 .3 Rumah Bersalin
- 449 .4 Posyandu
- 449 .5 Laboratorium Kesehatan
- 449 .6 Apotik
- 449 .7 Sanatorium Kesehatan
- 450 AGAMA
- 450 .1 Kebijakan dan Program Pemerintah Dalam Pembinaan dan Pengawasan Bidang Keagamaan
- 450 .2 Bantuan di Bidang Keagamaan
- 451 Islam
- 451 .1 Peribadatan
- 451 .11 Sholat
- 451 .12 Zakat, Infaq, Shodaqoh

- 451 .13 Puasa
- 451 .14 Umroh dan Haji
- 451 .2 Rumah Ibadah (Masjid, Musholla, Surau)
- 451 .3 Tokoh Agama
- 451 .4 Pendidikan Agama
- 451 .41 Pendidikan Tinggi Agama
- 451 .42 Menengah, MTs, MA
- 451 .43 Dasar, Pra Sekolah, MI
- 451 .44 Lembaga Pendidikan Non Formal (TPQ/Madrasah Diniyah, Pondok Pesantren dll)
- 451 .45 Sarana Pendidikan Meliputi Buku, Gedung Sekolah dll
- 451 .46 Tenaga Pengajar
- 451 .47 Dakwah (Pengajian, MTQ)
- 451 .5 Wakaf
- 451 .6 Mazhab Agama Islam
- 451 .7 Organisasi Keagamaan Bukan Politik (Majelis Ulama Indonesia, Dewan Hisab Rukyat dll)
- 451 .8 Tokoh Agama, Rohaniawan (Da'i)
- 452 Kristen Protestan
- 452 .1 Peribadatan
- 452 .2 Rumah Ibadah Gereja dll
- 452 .3 Tokoh Agama, Rohaniawan (Pendeta, Domine dll)
- 452 .4 Mazhab Agama Kristen Protestan
- 452 .5 Organisasi Gerejani
- 453 Khatolik
- 453 .1 Peribadatan
- 453 .2 Rumah Ibadah Gereja dll
- 453 .3 Tokoh Agama, Rohaniawan
- 453 .4 Mazhab Agama Khatolik
- 453 .5 Organisasi Gerejani
- 454 Hindu
- 454 .1 Peribadatan
- 454 .2 Rumah Ibadah Pura dll
- 454 .3 Tokoh Agama, Rohaniawan
- 454 .4 Mazhab Agama Hindu
- 454 .5 Organisasi Agama Hindu
- 455 Budha
- 455 .1 Peribadatan
- 455 .2 Rumah Ibadah Candi, Vihara dll
- 455 .3 Tokoh Agama, Rohaniawan
- 455 .4 Mazhab Agama Budha
- 455 .5 Organisasi Agama Budha
- 456 Kong Hu Cu
- 456 .1 Peribadatan
- 456 .2 Rumah Ibadah Klenteng dll
- 456 .3 Tokoh Agama, Rohaniawan
- 456 .4 Mazhab Agama Kong Hu Cu
- 456 .5 Organisasi Agama Kong Hu Cu

460	SOSIAL
461	Rehabilitasi Penyandang Cacat
461 .1	Cacat Ganda
461 .2	Cacat Fisik
461 .3	Cacat Mental
462	Rehabilitasi Sosial
462 .1	Gelandangan/Orang Terlantar, Anak Jalanan
462 .2	Pengemis
462 .3	Tuna Susila
462 .4	Anak Nakal
462 .5	Tuna Wisma
463	Kesejahteraan Anak dan Keluarga
463 .1	Kesejahteraan Anak
463 .11	Pengarusutamaan Hak-hak Anak (PUHA)
463 .12	Perlindungan Anak
463 .13	Anak asuh
463 .2	Kualitas Hidup Perempuan
463 .21	Perlindungan Perempuan
463 .22	Ibu Teladan
463 .23	Pengarusutamaan Gender (PUG)
464	Keperintisan dan Kepahlawanan
464 .1	Pahlawan Meliputi Penghargaan Kepada Pahlawan, Tunjangan Kepada Pahlawan dan Jandanya.
464 .2	Perintis Kemerdekaan Meliputi Pembinaan, Penghargaan dan Tunjangan Kepada Perintis Kemerdekaan dan Jandanya
464 .3	Cacat Veteran
465	Kesejahteraan Sosial
465 .1	Lanjut Usia
465 .2	Korban Kekacauan, Pengungsian, Rehabilitasi
465 .3	Masyarakat Miskin: Raskin, BLT dll
466	Sumbangan/Bantuan Sosial
466 .1	Korban Bencana
466 .11	Jaminan Sosial
466 .2	Bantuan Sosial
466 .21	Modal Usaha
466 .22	Pengobatan/Kesehatan
466 .23	Perumahan
466 .24	Beasiswa Sekolah
466 .25	Kematian
466 .26	Tempat Ibadah
466 .27	Bantuan Lainnya
466 .3	Pencarian Dana Untuk Sumbangan : Penyelenggaraan Undian, Ketangkasan, Bazar dsb
466 .4	Panti Asuhan
466 .5	Panti Wredha
467	Bimbingan Sosial

- 467 .1 Masyarakat Suku Terasing Meliputi: Bimbingan Pendidikan, Kesehatan, Pemukiman, Pembinaan Komunitas Adat Terpencil (PKAT) dan Sebagainya
- 468 PMI
- 469 Makam
- 469 .1 Umum
- 469 .2 Pahlawan
- 469 .3 Khusus, Keluarga, Raja
- 469 .4 Krematorium
- 470 KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
- 470 .1 Kebijakan dan Program Pemerintah Untuk Kependudukan
- 471 Pendaftaran Penduduk
- 471 .1 Identitas Penduduk
- 471 .11 Biodata
- 471 .12 Nomor Induk Kependudukan
- 471 .13 Kartu Tanda Penduduk
- 471 .14 Kartu Keluarga
- 471 .15 Advokasi Identitas Penduduk
- 471 .2 Perpindahan Penduduk Dalam Wilayah Indonesia
- 471 .21 Perpindahan Penduduk WNI
- 471 .22 Perpindahan penduduk WNA Dalam Wilayah Indonesia
- 471 .23 Perpindahan Penduduk WNA dan WNI Tinggal Sementara
- 471 .24 Daerah Terbelakang
- 471 .25 Bedol Desa
- 471 .3 Perpindahan Penduduk Antar Negara
- 471 .31 Penduduk Indonesia ke Luar Negeri
- 471 .32 Orang Asing Tinggal Sementara
- 471 .33 Orang Asing Tinggal Tetap
- 471 .34 Perpindahan Penduduk Antar Negara di Wilayah Perbatasan Antar Negara (Pelintas Batas Tradisional)
- 471 .4 Pendaftaran Pengungsi dan Penduduk Rentan
- 471 .41 Akibat Bencana Alam
- 471 .42 Akibat Kerusakan Sosial
- 471 .43 Pendaftaran Penduduk Daerah Terbelakang
- 471 .44 Pendaftaran Penduduk Rentan
- 472 Pencatatan Sipil
- 472 .1 Kelahiran Kematian dan Advokasi
- 472 .11 Kelahiran
- 472 .12 Kematian
- 472 .13 Advokasi
- 472 .2 Perkawinan, Perceraian dan Advokasi
- 472 .21 Perkawinan Agama Islam
- 472 .22 Perkawinan Agama non Islam
- 472 .23 Perceraian Agama Islam
- 472 .24 Perceraian Agama non Islam
- 472 .25 Advokasi
- 472 .3 Pengangkatan Pengakuan dan Pengesahan Anak Serta Perubahan dan Pembatalan Akta dan Advokasi

- 472 .31 Pengangkatan Anak
- 472 .32 Pengakuan Anak
- 472 .33 Pengesahan Anak
- 472 .34 Perubahan Akta
- 472 .35 Pembatalan Akta
- 472 .36 Advokasi
- 472 .37 Pendampingan Anak
- 472 .4 Pencatatan Kewarganegaraan
- 472 .41 Akibat Perkawinan
- 472 .42 Akibat Kelahiran
- 472 .43 Non Perkawinan Non Kelahiran
- 472 .44 Naturalisasi
- 472 .45 Perubahan WNI ke WNA
- 473 Informasi Kependudukan
- 473 .1 Teknologi Informasi
- 473 .2 Pengolahan Data Kependudukan
- 473 .21 Pendaftaran Penduduk
- 473 .22 Kejadian Vital Penduduk
- 473 .23 Penduduk non Registrasi
- 473 .3 Pelayanan Informasi Kependudukan
- 474 Perkembangan Penduduk
- 474 .1 Pengarahan Kuantitas Penduduk
- 474 .11 Struktur Jumlah
- 474 .12 Komposisi
- 474 .13 Fertilitas
- 474 .14 Kesehatan Reproduksi
- 474 .15 Morbiditas Penduduk
- 474 .16 Mortalitas Penduduk
- 474 .2 Pengembangan Kuantitas Penduduk
- 474 .21 Anak dan Remaja
- 474 .22 Penduduk Usia Produktif
- 474 .23 Penduduk Laniut Usia
- 474 .24 Gender
- 474 .3 Penataan Persebaran Penduduk
- 474 .31 Migrasi Antar Wilayah
- 474 .32 Urbanisasi
- 474 .4 Perlindungan dan Pemperdayaan Penduduk
- 474 .5 Pengembangan Wawasan Kependudukan
- 475 Transmigrasi
- 475 .1 Penyiapan Informasi Daerah Transmigrasi
- 475 .11 Informasi Potensi Peluang Bekerja dan Berusaha di Daerah Transmigrasi
- 475 .12 Perbandingan Potensi Daerah Asal dan Daerah Transmigrasi
- 475 .13 Permasalahatan / Sosialisasi Transmigrasi
- 475 .14 Peran serta Lembaga dan Instansi Terkait Serta Media Massa Dalam Penyampaian Informasi Transmigrasi
- 475 .15 Publikasi Transmigrasi Melalui Pameran dan Kesenian

- 475 .16 Bimbingan dan Penyuluhan Transmigrasi Bagi Masyarakat Daerah Asal dan Daerah Transmigrasi
- 475 .17 Kerjasama di Bidang Transmigrasi
- 475 .18 Kepulangan Transmigran Karena Daerah Terjadi Konflik
- 475 .2 Pemukiman Transmigrasi
- 475 .21 Penggunaan Tanah Pemukiman Transmigrasi
- 475 .22 Pengembangan, Struktur Wilayah dan Analisis Data Wilayah Transmigrasi
- 475 .23 Tata Ruang Satuan Kawasan Pengembangan, Study Kelayakan dan Dampak Lingkungan Transmigrasi
- 475 .24 Teknis Ruang Satuan Pemukiman dan Lokasi / Peta Informasi Pemukiman
- 475 .25 Standarisasi dan Spesifikasi Teknis Rumah Transmigran, Fasilitas Umum /Social dan Jaringan Transportasi
- 475 .26 Tanah Pemukiman, Pengadaan Areal Tanah dan Pembebasannya, Identifikasi, Pengukuran dan Pembuatan Batas Areal Tanah

- 475 .27 Penyelesaian Masalah Tanah di Lokasi Pemukiman Transmigrasi
- 475 .28 Tata Ruang Pemukiman Transmigrasi
- 475 .281 Rancangan dan Pemanfaatan Areal Tanah
- 475 .282 Rancangan Kapling TSM
- 475 .283 Pengukuran dan Pembagian Lahan Pekarangan, Lahan Usaha dan Fasilitas Umum
- 475 .284 Penyelesaian Kekurangan Lahan Usaha Kepada Transmigran dan Sengketa Tanah
- 475 .285 Inventarisasi Penataan Kembali dan Penggunaan Areal Tanah
- 475 .286 Pengukuran Batas Unit Pemukiman
- 475 .287 Penyelesaian Perubahan Areal dan Urusan Perijinan Pemanfaatan Areal Tanah
- 475 .29 Sarana Pemukiman Transmigrasi
- 475 .291 Pembinaan dan Pengadilan, Penyiapan Bangunan Rumah Transmigran dan Jamban Keluarga dan Fasilitas Umum
- 475 .292 Pembinaan dan Pengendalian Penyiapan Sarana Air Bersih
- 475 .293 Pembinaan dan Pengendalian Pelaksanaan Sumber Energi
- 475 .294 Pembinaan dan Pengendalian Peningkatan Sarana
- 475 .295 Pembinaan, Pengendalian dan Teknis Peningkatan Potensi Lahan dan Lingkungan
- 475 .3 Pengerahan, Pemandahan dan Penempatan
- 475 .31 Pengkajian dan Pengembangan Metode Pengerahan dan Penempatan
- 475 .32 Teknis Penyuluhan dan Motivasi Dalam Pengerahan dan Penempatan
- 475 .33 Pengerahan
- 475 .331 Pendaftaran dan Seleksi Calon Transmigran
- 475 .332 Berkas Persyaratan dan Administrasi Calon Transmigran
- 475 .333 Transmigran Yang Dinyatakan Lulus Penyaringan
- 475 .34 Pemberangkatan Transmigran
- 475 .341 Pengangkutan Transmigran Melalui Laut, Udara, dan Ddarat

- 475 .342 Jadwal dan Tempat Pelaksanaan Pemberangkatan
- 475 .343 Pelaksanaan Pengurusan Pemberangkatan
- 475 .344 Pengawasan Perjalanan Transmigran
- 475 .345 Pengaturan Rute Pemberangkatan
- 475 .346 Alokasi Penempatan dan Surat Perintah Pemberangkatan
- 475 .35 Penempatan Transmigran
- 475 .351 Kesiapan Lokasi dan Daya Tampung
- 475 .352 Pendataan Transmigran di Lokasi Yang Masih Dibina
- 475 .353 Data Transmigran Yang Meninggalkan Lokasi disetiap UPT
- 475 .354 Pemantauan Penempatan Transmigrasi Pengganti
- 475 .4 Penampungan Transmigrasi (Transito), dan Pelatihan Transmigran

- 475 .41 Pelatihan Transmigran
- 475 .411 Program Pengajaran dan Metode Pelatihan
- 475 .412 Penyusunan Silabus dan Modul Pelatihan
- 475 .413 Penyusunan Calon Peserta/ Pelatih
- 475 .42 Penampungan Transmigran di Transito
- 475 .421 Pelayanan Kesehatan Bagi Transmigran
- 475 .422 Pelayanan Makanan Bagi Transmigran
- 475 .423 Pelayanan Pembekalan/ Peralatan Bagi Transmigran
- 475 .5 Pembinaan Masyarakat Transmigrasi
- 475 .51 Identifikasi dan Penjajagan Pembinaan
- 475 .511 Identifikasi, Analisis Data Pedoman Pelaksanaan Rencana Teknis Pembinaan Tahap Penyesuaian
- 475 .512 Identifikasi, Analisis Data Pedoman Pelaksanaan Rencana Teknis Pembinaan Tahap Pengembangan
- 475 .513 Identifikasi, Analisis Data Pedoman Pelaksanaan Rencana Teknis Pembinaan Tahap Pembinaan
- 475 .52 Pembinaan Pendidikan
- 475 .521 Penyediaan/Penyiapan Sarana dan Usaha Pengembangan Pendidikan
- 475 .522 Pelaksanaan Penyiapan Tenaga Pendidikan dan Status
- 475 .53 Pelaksanaan Peningkatan Partisipasi Masyarakat
- 475 .54 Pembinaan Kesehatan
- 475 .541 Penyediaan Sarana Kesehatan dan KB
- 475 .542 Penanggulangan Penyakit dan Kejadian Luar Biasa
- 475 .543 Pendistribusian Bantuan Pangan
- 475 .55 Pembinaan Rokhani
- 475 .551 Bimbingan Mental Spiritual dan Penyediaan Petugas Agama
- 475 .552 Bimbingan Adaptasi Masyarakat
- 475 .553 Bimbingan Pelaksanaan Penumbuhan Interaksi Sosial
- 475 .56 Pelayanan Pos di Daerah Transmigrasi
- 475 .57 Penyerahan UPT Yang Layak Untuk di Serahkan
- 475 .58 Penilaian Transmigran Teladan
- 475 .59 Pemantauan dan Penilaian Kelayakan Usaha
- 476 Keluarga Berencana
- 476 .1 Alat Kontrasepsi
- 476 .2 Pelayanan KB Melalui KB Lestari, KB Mandiri

- 476 .3 Penyuluh Lapangan KB (PLKB)
- 476 .4 Pos KB Desa
- 476 .5 Akseptor KB
- 476 .6 KIE (Komunikasi Informasi dan Edukasi)
- 476 .7 KKBPk (Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga)
- 476 .8 PPKB (Petugas Pembantu Keluarga Berencana)
- 480 MEDIA MASSA
- 480 .1 Kebijakan dan Program Pemerintah Dalam Bidang Media Massa
- 481 Media Cetak Meliputi Perijinan Hingga Pencabutan Ijin bila Terjadi Pelanggaran
 - 481 .1 Surat Kabar
 - 481 .2 Majalah
 - 481 .3 Buletin
 - 481 .4 Jurnal
 - 481 .5 Press Release, Klarifikasi Berita, Press Statistik
 - 481 .51 Perindustrian Perdagangan Termasuk 9 Harga Pokok
 - 481 .52 Perekonomian dan Perbankan
 - 481 .53 Bidang lainnya
 - 481 .6 Layanan Informasi/ Leaflet
 - 481 .7 Masukan Analisis Bupati
- 482 Media Elektronik Meliputi Perijinan Hingga Pencabutan Ijin Bila Terjadi Pelanggaran
 - 482 .1 Radio
 - 482 .2 Televisi
 - 482 .3 Film Dokumenter
 - 482 .4 Pengawasan Lembaga Penyiaran
 - 482 .5 Kelompok Pemantau Isi Siaran
 - 482 .6 Pengkajian Isi Siaran
 - 482 .7 SDM Penyiaran
- 483 Periklanan
 - 483 .1 Ketentuan Pemasangan Reklame
 - 483 .2 Pameran
- 484 Kewartawanan/ Jurnalistik
 - 484 .1 Pembentukan Organisasi Profesi
 - 484 .2 Kasus-kasus Kewartawanan
 - 484 .3 Penyalahgunaan Profesi
 - 484 .4 Bantuan Kepada/Dari Organisasi Profesi Wartawan
 - 484 .5 Musyawarah Wartawan Indonesia
 - 484 .6 Pendidikan Jurnalistik Khusus Wartawan
 - 484 .7 Temu Pers/Konferensi Pers
 - 484 .8 Pers Tour
 - 484 .9 Kunjungan Wartawan Asing
- 485 Penyuluhan Masyarakat
 - 485 .1 Publikasi
 - 485 .2 Pendirian Information Center
- 486 Pembinaan Bidang Infokom
 - 486 .1 Training Fotografi

- 486 .2 Training Berita Jurnalistik
- 486 .3 Bintek Infokom
- 486 .4 Rakorda Infokom
- 486 .5 Rakor Pengendalian Kegiatan
- 486 .6 Pengelolaan Website Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
- 487 Hubungan Antar Lembaga
- 487 .1 Non Pemerintah
- 487 .11 Wahana Komunikasi Masyarakat
- 487 .12 Lembaga Komunikasi Masyarakat
- 487 .2 Lembaga Pemerintah
- 487 .21 Pertemuan Bakohumas dan Kehumasan
- 487 .22 Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PID)
- 487 .3 Luar Negeri
- 487 .31 Promosi Luar Negeri
- 487 .32 Kunjungan Wartawan Asing
- 488 Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Informasi
- 489 Sistem Naskah Sosialisasi Kegiatan Gubernur
- 489 .1 Himpunan Naskah Sambutan, Himpunan Paparan, Himpunan Keynote Speaker, Himpunan Rubrik dan Himpunan Dialog Interaktif
- 489 .2 Dialog Interaktif
- 489 .3 Rubrik
- 489 .4 Materi /pointers Sambutan, Paparan, Naskah Keynote Speaker, Rubrik dan Dialog Interaktif
- 489 .5 Pembuatan Kolom Khusus Hasil-Hasil Pembangunan

- 500 PEREKONOMIAN
- 500 .1 Dewan Stabilisasi
- 501 Pengadaan Pangan
- 502 Pengadaan Sandang
- 503 Pengadaan Papan
- 504 Perizinan Pada Umumnya. Untuk Perizinan Sesuai Bidang, Klasifikasi Pada Masalahnya
- 505 -
- 506 -
- 507 -
- 508 -
- 509 -
- 510 PERDAGANGAN
- 510 .1 Promosi Perdagangan
- 510 .11 Pekan Raya
- 510 .12 Iklan
- 510 .13 Pameran
- 510 .14 Event-event
- 510 .15 Lomba-Lomba (Lomba desain Busana, Kerajinan)
- 510 .16 Pasar
- 510 .17 Pertokoan, Kios, PKL
- 510 .2 Pelelangan, Distribusi

- 510 .21 Pemasaran Sembako
- 510 .22 Pemasaran Hasil Industri
- 510 .23 Penentuan Harga Pokok
- 510 .3 Bina Usaha dan Sarana Perdagangan
- 510 .31 Rencana dan Program Kerja
- 510 .32 Pelaksanaan Pelayanan Administrasi
- 510 .33 Pelaksanaan Teknis
- 510 .34 Sistem Resi Gudang
- 510 .35 Pemantauan
- 510 .36 Evaluasi dan Pelaporan
- 510 .4 Perijinan (HO, Gangguan, Reklame, dll)
- 510 .41 Penerbitan, Perubahan SIUP
- 510 .42 Penerbitan, Perubahan TDP
- 510 .43 Persetujuan/Ijin Prinsip
- 510 .44 Rekomendasi
- 510 .5 Perdagangan Antar Pulau
- 510 .51 Kerjasama Bahan Baku
- 510 .52 Industri Pemasaran
- 510 .53 Kontrak
- 510 .6 Tera
- 510 .61 Tera Ulang Ukuran
- 510 .62 Takaran
- 510 .63 Timbangan dan Anak Timbangan
- 510 .64 Kalibrasi
- 510 .65 Cap Tanda Tera
- 510 .66 Biaya Tera
- 510 .7 Bantuan Peralatan
- 510 .71 Proposal
- 510 .72 Surat Perjanjian/Kontrak
- 510 .73 Serah Terima
- 510 .8 Perijinan/Rekomendasi Tanda Pabrik
- 510 .9 Kemetrologian
- 510 .91 Standar Tingkat Tiga
- 510 .92 Standar Kerja Satuan Ukuran
- 510 .93 Ukuran Metrologi
- 510 .931 Peralatan
- 510 .932 Laboratorium Metrologi Legal
- 510 .933 Tanki Ukur Mobil
- 510 .934 Meter Taxi
- 510 .935 KWH Meter Termasuk di Dalamnya Listrik dan PDAM
- 510 .936 SPBU
- 511 Pemasaran
- 511 .1 Sembilan Bahan Pokok, Diantaranya Beras, Garam, Minyak Tanah, Minyak Goreng, Sabun dan Sebagainya.
- 511 .2 Pasar
- 511 .3 Pertokoan, Kaki Lima, Kios
- 511 .4 Pusat Perbelanjaan
- 512 Ekspor

- 512 .1 Ekspor Hasil Industri
- 512 .2 Ijin Ekspor
- 512 .3 Pengembangan Pasar Luar Negeri
- 512 .4 Manajemen Perdagangan Internasional
- 512 .5 Ekspor Hasil Industri
- 512 .51 Kebijakan
- 512 .52 Pemasaran
- 512 .6 Pemberitahuan Ekspor Barang
- 512 .7 Pengawasan Mutu Barang
- 512 .8 Eksportir Terdaftar
- 512 .9 Evaluasi dan Pelaporan
- 513 Import
- 513 .1 Ijin Import
- 513 .11 Pemberian Ijin
- 513 .12 Pengendalian Ijin
- 513 .2 Standart Mata Dagang Import
- 513 .3 Manajemen Perdagangan Internasional
- 513 .4 Kegiatan Import
- 513 .41 Pembinaan Import
- 513 .42 Pengendalian Import
- 513 .43 Pemantauan Import
- 513 .5 Faktor-faktor Pendukung
- 513 .6 Pengawasan Mutu Barang Import
- 513 .7 Penyaluran Kegiatan Import
- 513 .71 Bahan Konsumsi
- 513 .72 Bahan Baku
- 513 .73 Bahan Penolong
- 513 .8 Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Import
- 514 Perdagangan Antar Pulau
- 514 .1 Kerjasama Bahan Baku
- 514 .2 Industri Pemasaran
- 514 .3 Kontrak
- 515 Pengembangan Potensi Perdagangan Luar Negeri
- 515 .1 Pengembangan Potensi Luar Negeri
- 515 .11 Promosi dan Informasi
- 515 .12 Pameran
- 515 .13 Kerjasama
- 516 Pergudangan, Termasuk Tangki Penyimpanan Minyak Goreng
- 516 .1 Peti kemas
- 516 .2 Tangki Penyimpanan
- 517 Aneka Usaha Perdagangan
- 518 Koperasi
- 518 .1 Bina Usaha Koperasi
- 518 .11 Koperasi Pertanian
- 518 .12 Koperasi Non Pertanian
- 518 .13 Permodalan Koperasi
- 518 .131 Pemupukan Modal
- 518 .132 Pemanfaatan Modal

- 518 .133 Perbankan dan Asuransi
- 518 .134 Permodalan Luar Koperasi
- 518 .135 Kredit Program Umum
- 518 .136 Kredit Program Khusus
- 518 .14 Distribusi dan Jasa Koperasi
- 518 .141 Distribusi Bahan Pokok
- 518 .142 Distribusi Aneka Bahan
- 518 .143 Distribusi Kerjasama Niaga
- 518 .144 Jasa Angkutan
- 518 .145 Jasa Perumahan
- 518 .146 Aneka Jasa
- 518 .15 Koperasi Kelistrikan, Industri dan Telekomunikasi
- 518 .151 Koperasi Kelistrikan
- 518 .152 Koperasi Industri
- 518 .153 Koperasi Telekomunikasi
- 518 .2 Bina Lembaga Koperasi
- 518 .21 Organisasi Koperasi
- 518 .211 Anggaran Dasar dan Akte Pendirian Koperasi
- 518 .212 Pemberian Badan Hukum Koperasi
- 518 .213 Penyelesaian Pembubaran Koperasi
- 518 .214 Perangkaan Koperasi
- 518 .215 Pengakuan Koperasi Sekolah
- 518 .216 Amalgamasi
- 518 .217 Tertib Organisasi Koperasi
- 518 .218 Penyelesaian Perselisihan/Persengketaan
- 518 .219 Bimbingan Kesadaran Hukum
- 518 .22 Bina Hubungan Alat Kelengkapan Organisasi Koperasi
- 518 .221 Rapat Anggota Koperasi
- 518 .222 Pengurus dan Badan Pemeriksa
- 518 .223 Dewan Koperasi Indonesia (DEKOPIN)
- 518 .224 Badan Penasehat dan Pertimbangan Koperasi Unit Desa (BPP KUD)

- 518 .23 Bina Tata Laksana Koperasi
- 518 .231 Klasifikasi Koperasi Pedesaan
- 518 .232 Klasifikasi Koperasi Perkotaan
- 518 .233 Klasifikasi Koperasi Sekunder
- 518 .234 Klasifikasi KUD Mandiri
- 518 .24 Administrasi Ketatalaksanaan Koperasi
- 518 .241 Administrasi Koperasi Pedesaan
- 518 .242 Administrasi Koperasi Perkotaan
- 518 .243 Karyawan/Manager Koperasi
- 518 .244 Sumber Daya Manusia
- 518 .245 Tenaga Kerja Sukarerla Terdidik (TKST)
- 518 .246 Penyaluran Alat Sekolah
- 518 .247 Bantuan Pemda kepada Koperasi/KUD
- 518 .25 Akuntansi
- 518 .251 Akuntansi Koperasi Pedesaan
- 518 .252 Akuntansi Koperasi Perkotaan

- 518 .253 Akuntansi Koperasi Sekunder
- 518 .26 Pengawasan Koperasi
- 518 .261 Pengawasan Koperasi Primer
- 518 .262 Pengawasan Koperasi Sekunder
- 518 .263 Koperasi Jasa Audit
- 518 .264 Kerjasama Kantor Akuntan
- 518 .27 Penyuluhan Koperasi
- 518 .271 Pembinaan Kader Koperasi
- 518 .272 Masyarakat Umum
- 518 .273 Forum Komunikasi
- 518 .274 Kelompok Tani
- 518 .275 Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan (PKKL)
- 518 .276 Penilaian Tingkat Nasional
- 518 .3 Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)
- 518 .31 Pembinaan Usaha
- 518 .311 Pembinaan Usaha Kecil
- 518 .312 Pembinaan Usaha Mikro
- 518 .313 Pembinaan Usaha Menengah
- 518 .32 Kredit Usaha
- 518 .321 Kredit Usaha Kecil
- 518 .322 Kredit Usaha Mikro
- 518 .322 Kredit Usaha Menengah
- 518 .33 Pengawasan Usaha
- 518 .331 Pengawasan Usaha Kecil
- 518 .332 Pengawasan Usaha Mikro
- 518 .333 Pengawasan Usaha Menengah
- 520 PERTANIAN
- 520 .1 Perijinan Bidang Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan
- 521 Tanaman Pangan
- 521 .1 Rencana dan Program
- 521 .11 Bimas/ Inmas Termasuk Kredit
- 521 .12 Pelaporan dan Evaluasi Pertanian
- 521 .2 Produksi
- 521 .21 Padi
- 521 .22 Palawija
- 521 .23 Holtikultura (Sayuran, Buah - buahan, Tanaman Hias)
- 521 .24 Pertanian Organik
- 521 .25 Panen Gagal (Puso)
- 521 .3 Sarana Usaha Pertanian
- 521 .31 Peralatan
- 521 .32 Meliputi Traktor dan sebagainya
- 521 .33 Pembenihan dan Pembibitan
- 521 .34 Pupuk
- 521 .35 Jaringan Irigasi/Senderan Irigasi
- 521 .36 Jalan Usaha Tani
- 521 .37 Dam Parit
- 521 .38 Rehabilitasi Lahan Pertanian
- 521 .4 Perlindungan Tanaman

- 521 .41 Pengendalian Hama dan Penyakit Tanaman Pangan
- 521 .411 Penyakit Tanaman Pangan
- 521 .412 Hama Tanaman Pangan
- 521 .42 Pemberantasan Hama
- 521 .421 Pestisida
- 521 .422 Agensi Pengendalian Hayati
- 521 .43 Tanah Pertanian Pangan
- 521 .431 Persawahan
- 521 .432 Perladangan
- 521 .433 Kebun
- 521 .5 Pengusaha, Petani
- 521 .6 Lahan Kritis
- 521 .7 Pemasaran dan Promosi Pertanian
- 521 .8 Pengembangan Sumber Daya Pertanian
- 522 Kehutanan
- 522 .1 Perencanaan Hutan
- 522 .11 Survey
- 522 .111 Survey PPA
- 522 .112 Survey Areal
- 522 .113 Survey Pembinaan Hutan
- 522 .114 Survey Potensi Hutan
- 522 .12 Pendataan/ Inventarisasi Areal Hutan
- 522 .121 Data Areal Tata Guna Hutan
- 522 .122 Data Areal Konservasi
- 522 .2 Tata Guna Hutan
- 522 .21 Tata Ruang Kawasan
- 522 .211 Pengurusan Kawasan Hutan
- 522 .212 Penafsiran Hutan
- 522 .213 Mutasi Hutan
- 522 .22 Tata Hutan
- 522 .221 Tata Hutan Sementara
- 522 .222 Tata Hutan Tetap
- 522 .223 Pembukaan Hutan
- 522 .23 Pengukuran dan Pemetaan
- 522 .3 Penguasaan Hutan
- 522 .31 Data Areal HPH
- 522 .311 SK HPH
- 522 .312 Kerja Sama
- 522 .313 Pembatalan/ Penolakan
- 522 .314 Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM)
- 522 .32 Modal dan Peralatan
- 522 .321 Inventarisasi Logging
- 522 .322 Inventarisasi Industri
- 522 .323 Peralatan
- 522 .324 Tenaga Kerja Pengusahaan Hutan
- 522 .325 Pemegang Saham
- 522 .326 Neraca Perusahaan
- 522 .33 Rencana Kerja

522 .331 KHPH
 522 .332 RKPH
 522 .333 Rencana Karya Lima Tahun RKPH
 522 .34 Perpanjangan HPH
 522 .35 Produksi
 522 .351 Target Produksi
 522 .352 Produksi Kayu
 522 .353 Produksi Non-Kayu
 522 .36 Industri
 522 .361 Industri Kayu HPH
 522 .362 Industri Kayu Non-HPH
 522 .363 Industri Non Kayu
 522 .37 Pembinaan HPH
 522 .371 Pelanggaran dan Sanksi
 522 .38 Pembangunan Hutan Tanaman Industri
 522 .381 Hutan Tanaman Industri Pulp
 522 .382 HTI Pertukangan
 522 .39 Iuran Hutan
 522 .4 Sarana Usaha
 522 .41 Standarisasi
 522 .411 Kayu
 522 .412 Non Kayu
 522 .42 Pengujian Hasil Hutan
 522 .43 Pengembangan
 522 .431 Pengembangan Perusahaan
 522 .432 Pengembangan Pemasaran
 522 .44 Pemasaran Hasil Hutan
 522 .45 SKSHH (Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan) Angkutan Hasil Hutan
 522 .451 Sarana dan Prasarana
 522 .452 Pembinaan dan Peningkatan Daya Hutan
 522 .46 Tata Usaha Hasil Hutan
 522 .461 Perijinan Hasil Hutan
 522 .47 PHBM (Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat)
 522 .5 Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam
 522 .51 Konservasi Jenis
 522 .511 Satwa yang Dilindungi
 522 .512 Satwa yang Tidak Dilindungi
 522 .513 Lembaga Konservasi Satwa
 522 .514 Lembaga Konservasi Tumbuhan
 522 .52 Kawasan Konservasi
 522 .521 Cagar Alam (Termasuk Laut)
 522 .522 Suaka Margasatwa
 522 .523 Taman Wisata (Termasuk Laut)
 522 .524 Taman Nasional
 522 .525 Taman Hutan Raya/Kebun Raya
 522 .526 Taman Baru
 522 .527 Hutan Lindung

- 522 .53 Pengkajian Lingkungan
- 522 .531 Amdal UKL, UPL di Dalam Kawasan Hutan
- 522 .532 Amdal UKL, UPL di Luar Kawasan Hutan
- 522 .54 Bina Cinta Alam
- 522 .541 Kelompok Pecinta Alam
- 522 .542 Kader Konservasi Sumber Daya Alam
- 522 .543 Penyuluh Konservasi Sumber Daya Alam
- 522 .544 LSM Lingkungan
- 522 .55 Pengamanan Hutan
- 522 .551 Jaga Wana
- 522 .552 PPNS
- 522 .553 Gangguan Keamanan Hutan
- 522 .554 Bencana Alam
- 522 .555 Kebakaran Hutan
- 522 .556 Sengketa Hutan
- 522 .557 Hama dan Penyakit
- 522 .558 Pestisida dan Pupuk Tanaman Hutan
- 522 .559 Alat dan Mesin Kehutanan
- 522 .6 Reboisasi dan Rehabilitasi Hutan
- 522 .61 Pembenihan
- 522 .611 Tegakan Benih
- 522 .612 Pengadaan Benih
- 522 .613 Pengujian dan Penyimpanan Benih
- 522 .614 Lalu Lintas dan Penyimpanan Benih
- 522 .615 Pembibitan
- 522 .616 Pengada dan Penedar Bibit Bersertifikat
- 522 .617 Pengada dan Penedar Bibit Tidak Bersertifikat
- 522 .62 Tanaman Reboisasi
- 522 .621 Lahan Kritis
- 522 .622 Reboisasi Lahan HPH
- 522 .623 Rehabilitasi Tanah Hutan
- 522 .624 Konservasi Tanah dan Air
- 522 .625 Pengendalian Perladangan
- 522 .626 Penghijauan
- 522 .627 Aneka Usaha Kehutanan
- 522 .63 Perhutanan Sosial
- 522 .631 Sutera Alam
- 522 .632 Minyak Kayu Putih
- 522 .633 Perlebahan
- 522 .7 Hutan Produksi
- 522 .71 Hutan Produksi Terbatas
- 522 .72 Hutan Produksi yang dapat dikonservasi
- 522 .8 Kawasan Lindung
- 523 Perikanan dan Kelautan
- 523 .1 Perijinan Bidang Kelautan dan Perikanan
- 523 .2 Rencana, Program, Statistik, Prospek dan Pelaporan Bidang Perikanan dan Kelautan
- 523 .21 Penyuluhan

- 523 .22 Teknologi
- 523 .3 Produksi Perikanan
- 523 .31 Pelelangan
- 523 .32 Standarisasi Mutu Hasil Perikanan
- 523 .33 Perikanan Budidaya : CBIB, CBIC
- 523 .34 Sertifikasi Kesehatan Ikan
- 523 .4 Usaha Perikanan
- 523 .41 Pelatihan Nelayan
- 523 .42 Pembinaan Wanita Nelayan
- 523 .43 Fasilitas Perijinan, SIUP, SIPI, SKP
- 523 .44 Perbenihan (termasuk di dalamnya BBI)
- 523 .5 Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan
- 523 .51 Eksport Hasil Perikanan
- 523 .52 Impor Hasil Perikanan
- 523 .53 Pemasaran Dalam Negeri
- 523 .54 Pengusaha Perikanan
- 523 .6 Sarana Perikanan
- 523 .61 Pelabuhan Perikanan Pantai
- 523 .62 TPI/PPI
- 523 .63 Kesyahbandaran
- 523 .64 Peralatan Penangkapan : Kapal, Perahu, Jaring, Pump dsb
- 523 .7 Pengendalian Hama dan Penyakit
- 523 .71 Penyakit Ikan
- 523 .72 Hama Ikan
- 523 .73 Obat-obatan Termasuk Sertifikasinya
- 523 .8 Konservasi dan Suaka Laut
- 523 .81 Transplantasi Bibit Karang
- 523 .82 Terumbu Karang
- 523 .83 Mangrove
- 523 .84 Garam
- 523 .85 Harta Karun di Dalam Laut
- 523 .86 Pembinaan/ Pendidikan Masyarakat Pesisir
- 523 .87 Pantai
- 523 .9 Restocking
- 524 Peternakan dan Kesehatan Hewan
- 524 .1 Perijinan Bidang Peternakan
- 524 .2 Produksi
- 524 .21 Pembibitan
- 524 .22 Penyebaran dan Pengembangan Peternakan
- 524 .23 Budidaya
- 524 .3 Usaha Pertanian
- 524 .31 Pelayanan Usaha
- 524 .32 Pengolahan Hasil dan Pemasaran
- 524 .33 Pengembangan SDM dan Kelembagaan Peternakan
- 524 .4 Kesehatan Hewan
- 524 .41 Pengamatan dan Penyidikan Penyakit Hewan
- 524 .42 Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan
- 524 .43 Obat-obat Hewan

524 .44 Pelayanan Kesehatan Hewan
 524 .5 Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan
 524 .51 Zoonosis dan Kesejahteraan Hewan
 524 .52 Hygieni dan Sanitasi
 524 .53 Produk Hewani
 524 .6 Laboratorium Kesehatan Hewan
 524 .61 Pengujian Mutu Asal Hewan
 524 .62 Pengujian Mutu Produk Bahan Asal Hewan
 524 .7 Inseminasi Buatan
 524 .71 Produksi Distribusi dan Pemasaran
 524 .72 Pemeliharaan Ternak dan Pelayanan Reproduksi
 524 .8 Pembibitan dan Budi Daya Ternak
 524 .81 Ternak Non Ruminansia
 524 .82 Ternak Ruminansia
 524 .9 Petani/Kelompok Peternak
 525 Perkebunan
 525 .1 Rencana dan Program
 525 .11 Pelaporan
 525 .12 Monitoring
 525 .13 Statistik Perkebunan
 525 .2 Produksi
 525 .21 Karet
 525 .22 T e h
 525 .23 Tembakau
 525 .24 Tebu
 525 .25 Cengkeh
 525 .26 Kelapa/Kopra/Kelapa Sawit
 525 .27 K o p i
 525 .28 Kakao
 525 .29 Jenis Tanaman Yang Lain
 525 .3 Usaha Perkebunan
 525 .31 Benih
 525 .32 Pembibitan
 525 .33 Kelompok Tani
 525 .34 Kemitraan
 525 .35 Rekomendasi Ijin Usaha Perkebunan
 525 .36 Pemasaran Hasil Perkebunan
 525 .4 Perlindungan Tanaman
 525 .41 Hama
 525 .42 Pestisida
 525 .43 Pupuk
 525 .44 Agensia Pengendalian Hayati
 525 .5 Alat dan Mesin Perkebunan
 525 .51 Power Sprayer
 525 .52 Hand Sprayer
 525 .53 Polibag
 525 .54 Alat Laboratorium Perkebunan
 525 .55 Reagen

525 .56 Sarana/ Alat Produksi Perkebunan
 525 .6 Pengolahan lahan
 525 .61 Terasering
 525 .7 Pemasyarakatan
 525 .71 Penyuluhan
 525 .72 Sosialisasi
 525 .73 Informasi
 526 Ketahanan Pangan
 526 .1 Program Bimbingan Massal
 526 .2 Pengembangan Sarana Sumber Daya
 526 .21 Pembinaan Teknologi
 526 .22 Sarana Produksi dan Permodalan
 526 .23 Kelembagaan
 526 .3 Agribisnis
 526 .31 Mutu Hasil
 526 .32 Pengelolaan Hasil Pangan
 526 .33 Pemasaran Hasil
 526 .34 Kemitraan
 526 .4 Distribusi Pangan
 526 .41 Sistem dan Pola Distribusi
 526 .42 Sarana dan Prasarana Distribusi
 526 .43 Pengadaan dan Cadangan Pangan
 526 .5 Kewaspadaan dan Keanekaragaman Pangan
 526 .51 Rawan Pangan, Keamanan dan Mutu Pangan
 526 .52 Pola Konsumsi Pangan Masyarakat
 526 .53 Sistem Informasi Pangan
 527 Penyuluhan
 527 .1 Sumber Daya Manusia
 527 .11 Penyuluhan
 527 .12 Pelaku Utama Pelaku Usaha
 527 .13 Stake Holder
 527 .2 Kelembagaan
 527 .21 Struktural
 527 .22 Non Struktural
 527 .23 Pelaku Utama Pelaku Usaha
 527 .24 Lembaga Profesi
 527 .3 Penyelenggaraan Penyuluhan
 527 .31 Program/Metode
 527 .32 Promosi/ Pameran/ Kampanye
 527 .33 Penghargaan/ Lomba
 527 .34 Materi
 530 PERINDUSTRIAN
 530 .1 Undang-Undang Gangguan
 530 .2 Hak Merk
 530 .3 Sertifikat Halal
 531 Industri Logam
 532 Industri Mesin / Elektronik
 533 Industri Kimia / Farmasi

534 Industri Tekstil
 535 Industri Makanan / Minuman
 536 Aneka Industri / Perusahaan
 536 .1 Home Industri
 537 Aneka Kerajinan
 537 .1 Kerajinan Rakyat
 538 Usaha Negara (BUMN)
 538 .1 Perjan
 538 .2 Perum
 538 .3 Persero
 539 BUMD/Perusahaan Daerah
 540 PERTAMBANGAN / KESAMUDRAAN
 541 Minyak dan Gas Bumi
 541 .1 Pengusahaan
 541 .11 Perijinan
 541 .12 Rekomendasi Teknis
 541 .13 Kontrak Kerja
 541 .14 Pengolahan
 541 .2 Penyaluran
 541 .3 Tangki, Pompa, Tanker
 542 Energi
 542 .1 Energi Alternatif
 542 .11 Gas Rawa
 542 .12 Bahan Bakar Nabati (Biofuel)
 542 .13 Biogas
 542 .14 Energi Baru Terbarukan
 542 .15 Perijinan
 542 .16 Rekomendasi
 542 .17 Pembinaan dan Pengawasan
 542 .2 Konservasi Energi
 542 .3 Pemetaan Energi
 542 .4 Rencana Umum Perencanaan Energi Daerah (RUPED)
 543 Pertambangan, Mineral dan Batubara
 543 .1 Wilayah Usaha Pertambangan (WIUP)
 543 .11 WIUP Batuan
 543 .12 WIUP Bukan Logam
 543 .13 WIUP Logam
 543 .14 WIUP Batubara
 543 .2 Rekomendasi Teknis
 543 .3 Perijinan
 543 .31 IUP Eksplorasi
 543 .32 IUP Operasi Produksi
 543 .33 IUP Operasi Produksi Khusus
 543 .34 Ijin Usaha Jasa Pertambangan
 543 .35 Pencabutan Ijin
 543 .4 Pembinaan
 543 .5 Pengawasan
 543 .51 Pengawasan Usaha Pertambangan

543	.52	Penertiban Kegiatan Pertambangan
543	.6	Pasca Tambang
543	.61	Reklamasi
543	.62	Penutupan
544		Air Tanah
544	.1	Cekungan Air Tanah (CAT)
544	.11	Pemetaan CAT
544	.12	Imbuhan CAT
544	.13	Lepasa CAT
544	.14	Konservasi
544	.15	Pengendalian Daya Rusak
544	.2	Rekomendasi Teknis
544	.3	Sumur Artetis
544	.4	Sumur Bor
544	.5	Surnur Gali/Pasak
544	.6	Pengusaha, Pengebor (APPATINDO)
544	.7	Sumur Pantau
544	.8	Harga Dasar Air/ Nilai Perolehan Air
544	.9	Hidrologi
545		Geologi
545	.1	Pemetaan
545	.2	Mitigasi Bencana Geologi
545	.3	Vulkanologi
545	.31	Pengawasan Vulkanologi
545	.32	Panas Bumi
545	.4	Hidrogeologi
545	.5	Gerakan Tanah (Longsor, Amblesan)
545	.6	Pengawasan, Pengendalian
546		Hidrologi
547		Kesamudraan
548		Penghematan Energi
550		PERHUBUNGAN
550	.1	Perijinan Bidang Perhubungan
551		Perhubungan Darat
551	.1	Lalu Lintas Jalan Raya, Sungai, Danau
551	.11	Keamanan Lalu Lintas, Rambu-Rambu
551	.12	Uji Kelayakan Kendaraan Bermotor (Keur)
551	.13	Kecelakaan Lalu Lintas
551	.2	Angkutan Jalan Raya
551	.21	Perizinan
551	.22	Terminal
551	.23	Alat Angkutan
551	.24	Jembatan Timbang/Lebih Muatan
551	.25	Uji Mutu
551	.3	Angkutan Sungai
551	.31	Keselamatan, Rambu-Rambu
551	.32	Lalu Lintas
551	.33	Alur dan Kolam Pelabuhan

551 .34 Trayek
 551 .35 Sarana / Kapal
 551 .36 Pelabuhan
 551 .37 Terminal
 551 .38 Kecelakaan
 551 .39 Perizinan
 551 .4 Angkutan Danau
 551 .41 Keselamatan, Rambu-Rambu
 551 .42 Lalu Lintas
 551 .43 Alur dan Kolam Pelabuhan
 551 .44 Trayek
 551 .45 Sarana / Kapal
 551 .46 Pelabuhan
 551 .47 Terminal
 551 .48 Kecelakaan
 551 .49 Perizinan
 551 .5 Feri
 551 .51 Sarpras/Kapal
 551 .52 Terminal
 551 .53 Pelabuhan
 551 .54 Trayek
 551 .55 Angkutan Penumpang/Angkutan Barang
 551 .56 Keselamatan
 551 .57 Kecelakaan
 551 .58 Perawatan/Perbaikan
 551 .59 Perijinan
 551 .6 Perkerata - Apian
 551 .61 Sarana Meliputi Lokomotif, Gerbong, Bogie
 551 .62 Prasarana (Jalan/Jembatan)
 551 .63 Trayek
 551 .64 Angkutan Penumpang
 551 .65 Angkutan Barang
 551 .66 Keselamatan
 551 .67 Kecelakaan
 551 .68 Perawatan / Perbaikan
 551 .69 Perizinan
 552 Perhubungan Laut
 552 .1 Lalu Lintas Angkutan Laut
 552 .11 Pelayaran Dalam Negeri
 552 .12 Pelayaran Luar Negeri
 552 .13 Pelayaran Haji
 552 .14 Pelayaran Charter/Wisata Turis
 552 .15 Pelayaran Khusus
 552 .16 Keamanan Lalu Lintas, Rambu-Rambu
 552 .2 Perkapalan - Alat Angkutan
 552 .21 Kapal Penumpang
 552 .22 Kapal Barang
 552 .23 Kapal Perang/Patroli/Negara

- 552 .24 Kapal Tanker
- 552 .25 Ponton/Tongkang
- 552 .26 Kapal Layar
- 552 .27 Kapal Layar Motor
- 552 .28 Kapal Kontainer
- 552 .3 Pelabuhan
- 552 .31 Tanah / Lokasi
- 552 .32 Alur Layar
- 552 .33 Dermaga
- 552 .34 Terminal Penumpang
- 552 .35 Terminal Kontainer
- 552 .36 Bangunan / Gedung / Gudang
- 552 .37 Perlengkapan Tarnbat Labuh
- 552 .38 Lapangan Penumpukan
- 552 .39 Pelabuhan Khusus / Dermaga Khusus
- 552 .4 Pengerukan / Perawatan
- 552 .41 Alur Pelayaran
- 552 .42 Kolam Pelabuhan
- 552 .43 Reklamasi Pantai
- 552 .44 Dumping Area
- 552 .45 Pekerjaan Bawah Air (Salvage)
- 552 .5 Penjagaan Pantai
- 552 .51 Patroli Bandar
- 552 .52 Patroli Perairan
- 552 .53 Penjagaan Pantai & Penanggulangan Keselamatan di Laut (GAMAT)

- 552 .6 Angkutan Barang
- 552 .61 P o s
- 552 .62 Minyak
- 552 .63 Log
- 552 .64 Ternak
- 552 .65 Sembilan Bahan Pokok
- 552 .66 Peti Kemas / EMKL
- 552 .67 Muatan Umum
- 552 .68 Barang Dalam Negeri, Barang Luar Negeri
- 552 .69 Bongkar Muat
- 552 .7 Keselamatan
- 552 .71 Rambu-Rambu / Mercu Suar
- 552 .72 Kelaikan Kapal / Pembangunan Kapal
- 552 .73 Fasilitas Keselamatan / Keamanan
- 552 .74 Telekomunikasi Pelayaran
- 552 .75 Serifikasi Kesempurnaan Kapal
- 552 .76 Sertifikasi Awak Kapal
- 552 .8 Kecelakaan Gangguan
- 552 .81 Kecelakaan Penumpang / Kapal
- 552 .82 Kecelakaan Barang
- 552 .83 Gangguan Sarana / Prasarana
- 552 .84 Pembajakan / Penyeludupan

552 .85 Pencemaran
 552 .9 Perijinan
 552 .91 Ijin Berlayar
 552 .92 Ijin Pekerjaan Bawah Air
 552 .93 Ijin Pembuatan dan Perubahan Bentuk Kapal
 552 .94 Ijin Pembukaan Kantor Cabang
 552 .95 Ijin Usaha Angkutan Laut
 552 .96 Ijin Usaha Penunjang Angkutan Laut
 552 .97 Ijin Pelayanan Jasa Kepelabuhanan
 552 .98 Ijin Pembangunan Pelabuhan Khusus
 552 .99 Ijin Pembangunan Dermaga Khusus
 553 Perhubungan Udara
 553 .1 Lalu Lintas Angkutan Udara
 553 .11 Penerbangan Domestik
 553 .12 Penerbangan Luar Negeri
 553 .13 Penerbangan Haji
 553 .14 Penerbangan Charter / Non Reguler
 553 .15 Penerbangan Khusus / Jembatan Udara
 553 .2 Pelabuhan Udara
 553 .21 Tanah / Lokasi
 553 .22 Landasan
 553 .23 Apron
 553 .24 Terminal Penumpang
 553 .25 Terminal Cargo
 553 .26 Bangunan / Gedung
 553 .27 Perlengkapan
 553 .28 Parkir Kendaraan
 553 .3 Alat Angkutan
 553 .31 Pesawat Udara
 553 .32 Helikopter
 553 .4 Angkutan Barang
 553 .41 P o s
 553 .42 Muatan Dalam Negeri
 553 .43 Muatan Luar Negeri
 553 .44 EMPU
 553 .5 Sertifikasi Kelaikan
 553 .51 Kelaikan Pesawat Udara
 553 .52 Kelaikan Peralatan Penunjang
 553 .53 Kelaikan Personil / Awak Kapal
 553 .6 Keselamatan
 553 .61 Rambu-Rambu
 553 .62 Perakitan / Kalibrasi
 553 .63 Fasilitas Keselamatan
 553 .64 Telekomunikasi Penerbangan
 553 .7 Kecelakaan / Gangguan
 553 .71 Kecelakaan Penumpang
 553 .72 Kecelakaan Barang
 553 .73 Gangguan Sarana / Prasarana

553 .74 Pembajakan
 553 .75 Pencemaran
 553 .8 Umum
 553 .81 Asuransi
 553 .82 Asosiasi
 553 .83 SATPAM
 553 .84 Rally Udara / Lomba
 553 .9 Perizinan
 553 .91 Izin Terbang / Flight Approval
 553 .92 Usaha Kegiatan Penunjang Penerbangan / EMPU
 553 .93 Pembukaan Kantor Cabang
 553 .94 Rekomendasi Ketinggian Bangunan
 553 .95 Pembangunan Bandar Udara Khusus
 554 Pos
 554 .1 Pembinaan
 554 .11 Kebutuhan Fasilitas
 554 .12 Rehabilitasi / Perawatan
 554 .13 Bina Usaha / Pengawasan / Penertiban
 554 .14 Standarisasi Perangkat
 554 .15 Tanah / Bangunan
 554 .16 Filateli
 554 .17 Asosiasi
 554 .18 Laporan dan Evaluasi
 554 .2 Pelayanan
 554 .21 Jasa Pos
 554 .22 Jasa Titipan
 554 .23 Jasa Giro
 554 .24 Benda Pos / Perangko
 554 .25 Sampul Peringatan
 554 .26 Jasa Pos Elektronik
 554 .3 Perijinan
 554 .31 Rekomendasi Usaha Jasa Pos / Titipan
 554 .32 Pembukaan Agen / Cabang
 554 .4 Gangguan Sarana dan Prasarana
 554 .41 Kecelakaan
 554 .42 Sabotase
 554 .43 Penyelundupan
 555 Teknologi Informasi
 555 .1 Kebijakan
 555 .2 Perijinan Bidang Komunikasi dan Informasi
 555 .3 Peralatan
 555 .31 Telepon
 555 .32 Internet/USO
 555 .33 Warnet
 555 .34 Telegram, Telex / SBB, Faximile
 555 .35 Satelit, Stasiun Bumi
 555 .36 Radio Komunikasi
 555 .37 Tower Komunikasi

- 555 .4 Sistem
- 555 .5 Pembinaan/ Penertiban
- 555 .6 Perijinan
- 556 Pariwisata dan Rekreasi
- 556 .1 Perijinan Bidang Pariwisata
- 556 .2 Usaha Pariwisata
- 556 .21 Usaha Jasa Pariwisata
- 556 .211 Usaha Jasa Biro Perjalanan Wisata
- 556 .212 Restoran dan Rumah Makan
- 556 .22 Ijn Usaha Obyek dan Atraksi Wisata
- 556 .23 Pengusahaan Obyek dan Daya Tarik Wisata
- 556 .24 Usaha Sarana Pariwisata
- 556 .25 Wisatawan
- 556 .251 Wisatawan Nusantara
- 556 .252 Wisatwan Mancanegara
- 556 .26 Promosi dan Informasi Pariwisata
- 556 .261 Dalam Negeri
- 556 .261 Luar Negeri
- 556 .3 Perhotelan
- 556 .31 Status Hotel
- 556 .32 Kelas Hotel
- 556 .33 T a r i f
- 556 .4 Travel Service
- 556 .41 Pramuwisata
- 556 .42 Biro Perjalanan / Angkutan Wisata
- 556 .43 Souvenir
- 556 .44 Kemudahan Wisata (Visa, Bea Cukai, Karantina)
- 556 .5 Tempat Rekreasi
- 556 .51 Obyek dan Daya Tarik Wisata
- 556 .511 Ciptaan Tuhan
- 556 .512 Hasil Karya Manusia
- 556 .52 Rehabilitasi / Perawatan
- 556 .53 Pengembangan Fasilitas
- 556 .54 Tanah / Bangunan
- 556 .55 Bina Usaha
- 556 .56 Institusi
- 556 .561 Asosiasi
- 556 .562 Lembaga Kepariwisataaan
- 557 Metereologi
- 557 .1 Curah Hujan
- 557 .2 Hujan Buatan
- 557 .3 Peneropongan Bintang
- 560 TENAGA KERJA
- 560 .1 Perijinan Bidang Tenaga Kerja
- 560 .2 Data Permintaan TKI/TKW Dari Luar Negeri
- 560 .21 Data Persediaan TKI/TKW Dari Daerah
- 560 .3 Job Order TKI ke Luar Negeri Oleh PJTKI
- 560 .4 Rekrutmen Calon TKI/TKW

- 560 .5 Seleksi Naker ke Luar Negeri
- 560 .51 Pendaftaran dan Seleksi Calon TKI/TKW
- 560 .52 Berkas Persyaratan Calon TKI/TKW
- 560 .53 Pemeriksaan dan Hasil Cek Kesehatan TKI/TKW
- 560 .6 Persyaratan Naker TKI/TKW
- 560 .61 Permohonan Rekomendasi Passport
- 560 .62 Perjanjian Kerja TKI/TKW
- 560 .63 Kartu Identitas Tenaga Kerja Indonesia (KITKI)
- 560 .64 Permohonan Fiskal Ke Luar Negeri
- 560 .65 Pelatihan TKI/TKW
- 560 .7 Pemberangkatan Naker
- 560 .71 Pemberangkatan Ke Luar Negeri
- 560 .72 Pembekalan Akhir Pemberangkatan TKI/TKW Ke Luar Negeri
- 560 .73 Berita Acara Serah Terima TKI/TKW
- 560 .8 Pemulangan Naker
- 560 .81 Kepulangan TKI/TKW Karena Kontraknya Habis
- 560 .82 Pemulangan TKI/TKW Ilegal
- 560 .83 TKI/TKW Terkena Kasus Pidana
- 561 Upah
- 561 .1 Kegiatan dan Hasil Sidang Dewan Penelitian Pengupahan Daerah/Nasional
- 561 .2 Permohonan Penangguhan Pelaksanaan Pembayaran Upah Minimum Kabupaten/Kota dan Provinsi
- 561 .3 Kebutuhan Fisik Minimum
- 561 .4 Perhitungan Upah Kerja (Termasuk Didalamnya Upah Lembur)
- 561 .5 Laporan Data Remittance
- 561 .6 Pembayaran Gaji/Upah TKI/TKW
- 562 Penempatan Tenaga Kerja
- 562 .1 Penempatan Naker Mandiri Terdidik (TKMT)
- 562 .11 Penempatan Naker Mandiri Profesional (TKMP)
- 562 .12 Penempatan Naker Non Terdidik dan Non Profesional
- 562 .13 Pengembangan Kesempatan Berusaha/Perluasan Kerja
- 562 .2 Kesepakatan Kerja Bersama (KKB)
- 562 .3 Lembaga Penyalur Naker
- 562 .31 Ijin Pendirian Lembaga Penyalur Naker Antar Kerja Lokal/Daerah dan Antar Kerja Negara (AKAN)
- 562 .32 Data Evaluasi Kinerja Penyalur Jasa Tenaga Kerja (PJTKI/BKS/BKK)
- 562 .33 Pencabutan Ijin Penyalur Jasa Tenaga Kerja (PJTKI, BKK, BKS)
- 563 Latihan Kerja
- 563 .1 Pendidikan Pekerja
- 563 .11 Pendidikan dan Latihan Kerja
- 563 .12 Diklat di Dalam Negeri (PKL, Prakerin, OJT)
- 563 .13 Diklat di Luar Negeri (Pemagangan)
- 563 .2 Sarana dan Prasarana Latihan Kerja
- 563 .21 Tempat Pelatihan Kerja (BLK)
- 563 .22 Instruktur/Pelatih

- 563 .23 Modul/Silabus dan Bahan Praktek
- 563 .24 Kurikulum dan Metode Pengajaran
- 563 .25 Sertifikat
- 563 .3 Kerjasama Pelatihan Tenaga Kerja
- 564 Tenaga Sukarela
- 564 .1 Butsi
- 564 .2 Padat Karya
- 565 Perselisihan Pekerja
- 565 .1 Perselisihan dan Perkara Hukum Naker
- 565 .11 Pengaduan Perkara Pekerja/ NAKER
- 565 .12 Pemeriksaan Perkara Pekerja/NAKER
- 565 .13 Penyelidikan dan Penyidikan Perkara Pekerja/NAKER
- 565 .14 Sidang Perkara Perselisihan Pekerja/NAKER
- 565 .15 Hasil Putusan Sidang Perkara Perselisihan Pekerja (NAKER)
- 565 .16 Peninjauan Kembali Hasil Putusan Sidang KP2K (P4D/P4P)
- 565 .17 Permintaan Eksekusi Terhadap Hasil Keputusan KP2K (P4D/P4P)

- 565 .18 Daftar Usulan, Susunan dan Penetapan Anggota KP2K (P4D/P4P)

- 565 .2 Pemogokan/Unjuk Rasa Tenaga Kerja
- 566 Keselamatan Kerja
- 566 .1 Instalasi Proteksi Kebakaran
- 566 .2 Pemakaian Alat Keselamatan Kerja
- 566 .3 Keterangan Kelayakan atau Pelindung Diri (APD) dalam bekerja
- 566 .4 Pengangkatan dan Pembinaan Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
- 566 .5 Pelatihan/Pembinaan Hyperkes dan Keselamatan Kerja
- 566 .6 Pengujian dan Hasil Pemeriksaan Hyperkes dan Keselamatan Kerja

- 566 .7 Gangguan Lingkungan Tempat Usaha
- 566 .8 Perlengkapan Sarana Kerja
- 566 .81 Pemasangan dan Pemakaian Lift (Pesawat Angkat/Angkut)
- 566 .82 Pemasangan dan Pemakaian Pesawat Uap (Ketel Uap)
- 566 .83 Pemasangan dan Pemakaian Motor Diesel
- 566 .84 Pemasangan dan Pemakaian Tangki Tak Bertekanan
- 566 .85 Pemasangan dan Pemakaian Alat Pemadam Kebakaran
- 566 .9 Ijin Tenaga Kerja Wanita Masuk Malam Hari (Shift Malam)
- 567 Pemutusan Hubungan Kerja
- 567 .1 Pengaduan PHK Sepihak
- 567 .2 PHK Masal
- 567 .3 Bantuan Hukum Bagi Pekerja Yang di PHK
- 567 .4 Ijin Melakukan PHK
- 567 .5 Penghitungan Masa Kerja Bagi Pekerja Yang di PHK
- 567 .6 Pemberian Uang Tunggu Bagi Pekerja Yang di PHK
- 567 .7 Pemberian Uang Pesangon Bagi Pekerja Yang di PHK
- 568 Kesejahteraan Buruh
- 568 .1 Bantuan Kredit/Bantuan Modal Kerja Bagi Naker
- 568 .11 Pemilihan Pekerja Teladan

568 .2	Perumahan Pekerja
568 .3	Keikutsertaan Pekerja Dalam Program Jamsostek
568 .4	Koperasi Pekerja
568 .5	Sarana Transportasi Pekerja
568 .6	Perpustakaan Pekerja
568 .7	Tempat Ibadah Pekerja
568 .8	Rekreasi dan Olah Raga Pekerja
568 .9	Pendirian, Pendaftaran, dan Kegiatan Organisasi Pekerja
568 .91	Lembaga Kerjasama Bipartid
569	Tenaga Kerja Orang Asing
569 .1	Rekomendasi Perpanjangan Ijin Kerja Tenaga Asing (IKTA)
569 .2	Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA)
569 .3	Kualifikasi Keahlian Tenaga Kerja Asing
569 .4	Perjanjian Kerja Dengan Negara Asing
569 .5	Data Tenaga Kerja Asing
569 .6	Kecelakaan / Kematian Tenaga Kerja Asing
569 .7	Pemulangan Tenaga Kerja Asing
569 .8	Pemberdayaan dan Kontribusi Tenaga Kerja Asing
569 .9	Tenaga Kerja Asing Ilegal
570	PENANAMAN MODAL
570 .1	Penanaman Modal Dalam Negeri
570 .2	Penanarnan Modal Asing
571	Modal Patungan (Joint Venture)/Penyertaan Modal
572	Pasar Uang dan Modal
573	Saham
580	PERBANKAN MONETER
581	Kredit
582	Investasi
583	Tabungan
583 .1	Deposito
583 .2	Tabanas
583 .3	Taska
583 .4	Tapelpram
584	Perbankan
584 .1	Bank Jateng
584 .2	BPR BKK
584 .3	Lembaga Keuangan Mikro (LKM)
584 .4	Rapat Pemegang Saham
585	Asuransi
585 .1	Dana Kecelakaan Lalu Lintas
585 .2	Polis
585 .3	Premi
585 .4	Tertanggung/Pemegang Polis
585 .5	Uang Pertanggungan
586	Alat Pembayaran Meliputi : Chek, Giro, Wesel, Transfer
587	Fiscal
588	Hutang Negara Obligasi
589	Moneter

590	AGRARIA
590 .1	Perijinan Bidang Penataan Ruang dan Peranahan
591	Tata Guna Tanah
591 .1	Pemetaan dan Pengukuran
591 .2	Perpetaan
591 .3	Penyediaan Data, Peta dan Publikasi
591 .4	Fakta Tata Guna Tanah
591 .5	Tanah Kritis
592	Landreform
592 .1	Redistribusi
592 .11	Pendaftaran Pemilikan dan Pengurusan Tanah Pertanian
592 .12	Penentuan Tanah Obyek Landreform
592 .13	Pembagian Tanah Obyek Landreform
592 .14	Sengketa Redistribusi Tanah Obyek Landreform
592 .2	Ganti Rugi
592 .21	Ganti Rugi Tanah Kelebihan
592 .22	Sengketa Ganti Rugi Tanah Kelebihan
592 .23	Ganti Rugi Tanah Absentee
592 .24	Sengketa Ganti Rugi Tanah Absentee
592 .25	Ganti Rugi Tanah Partikelir
592 .26	Sengketa Ganti Rugi Tanah Partikelir
592 .3	Bagi Hasil
592 .31	Penetapan Imbangan Bagi Hasil
592 .32	Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil
592 .33	Sengketa Perjanjian Bagi Hasil
592 .4	Gadai Tanah
592 .41	Pendaftaran Pelaksanaan Gadai Tanah
592 .42	Pelaksanaan Gadai Tanah
592 .43	Sengketa Gadai Tanah
592 .5	Bimbingan dan Penyuluhan
592 .6	Pengembangan
592 .7	Yayasan Dana Landreform (YDL)
593	Pengurusan Hak-Hak Tanah
593 .1	Penyusunan Program dan Bimbingan Teknis
593 .11	Sewa Tanah
593 .111	Sewa Tanah Untuk Tanaman Tertentu : Tebu, Tembakau, Rosela, Corchorus
593 .2	Hak Milik
593 .21	Perorangan
593 .22	Badan Hukum
593 .3	Hak Pakai
593 .31	Perorangan
593 .311	Warga Negara Indonesia
593 .312	Warga Negara Asing
593 .32	Badan Hukum
593 .321	Badan Hukum Indonesia
593 .322	Badan Hukum Asing, Kedutaan, Konsulat, Kantor Dagang Asing
593 .33	Tanah Gedung-gedung Negeri

- 593 .4 Guna Usaha
- 593 .41 Perkebunan Besar
- 593 .42 Perkebunan Rakyat
- 593 .43 Peternakan
- 593 .44 Perikanan
- 593 .45 Kehutanan
- 593 .5 Hak Guna Bangunan
- 593 .51 Perorangan
- 593 .52 Badan Hukum
- 593 .53 P3MB (Panitia Pelaksana Pengusahaan Milik Belanda)
- 593 .54 Badan Hukum Asing Belanda - PBK No. 5/65
- 593 .55 Pemulihan Hak (Pen Pres 4/1960)
- 593 .6 Hak Pengelolaan
- 593 .61 PN Perurnnas, Bonded Ware House, Industrial Estate, Real Estate

- 593 .62 Perusahaan Daerah Pembangunan Perumahan
- 593 .7 Sengketa Tanah
- 593 .71 Peradilan Perkara Tanah (lihat juga 183)
- 593 .8 Pencabutan dan Pembebasan Tanah
- 593 .81 Pencabutan Hak
- 593 .82 Pembebasan Tanah
- 593 .83 Ganti Rugi Tanah
- 594 Pendaftaran Tanah
- 594 .1 Pengukuran / Pemetaan
- 594 .11 Fotogrametri
- 594 .12 Teristris
- 594 .13 Triangulasi
- 594 .14 Peralatan
- 594 .2 Dana Pengukuran (Permen Agraria No. 6/1960)
- 594 .3 Sertifikat
- 594 .4 Pejabat Pembuat Akte Tanah
- 595 Transmigrasi
- 595 .1 Tata Guna Tanah
- 595 .2 Landreform
- 595 .3 Pengurusan Hak-hak Tanah
- 595 .4 Pendaftaran Tanah

- 600 PEKERJAN UMUM DAN KETENAGAAN
- 601 Kebijakan di Bidang PU dan Ketenagaan
- 602 Perijinan Bidang Pekerjaan Umum
- 603 Arsitektur
- 604 Bahan Bangunan
- 604 .1 Tanah dan Batu
- 604 .3 Besi dan Logam Lainnya
- 604 .31 Besi Beton
- 604 .32 Besi Profil (Konstruksi)
- 604 .33 Paku
- 604 .34 Alumunium Profil

- 604 .4 Bahan-bahan Perlindungan dan Pengawet (Cat, Tech Oil, Pengawet Kayu)
- 604 .5 S e m e n
- 604 .6 K a y u
- 604 .7 Bahan Penutup Atap
- 604 .8 Alat-alat Penggantung dan Pengunci
- 604 .9 Bahan-bahan Bangunan Lainnya
- 605 I n s t a l a n s i
- 605 .1 Instalansi Bangunan
- 605 .2 Instalansi Listrik
- 605 .3 Instalansi Air /Sanitasi
- 605 .4 Instalansi Pengatur Udara
- 605 .5 Instalansi Akustik
- 605 .6 Instalansi Cahaya/ Penerangan
- 606 Konstruksi Pencegahan
- 606 .1 Konstruksi Pencegahan Terhadap Kebakaran
- 606 .2 Terhadap Gempa
- 606 .3 Terhadap Angin/Udara/ Panas
- 606 .4 Terhadap Kegaduhan
- 606 .5 Terhadap Gas/Explosive
- 606 .6 Terhadap Serangga
- 606 .7 Terhadap Radiasi Atom
- 610 PENGAIRAN
- 611 Irigasi
- 611 .1 Bangunan Waduk
- 611 .11 Bendungan
- 611 .12 Tanggul
- 611 .13 Pelimpahan Banjir
- 611 .14 Menara Pengambilan
- 611 .15 Pembangunan Dermaga
- 611 .2 Bangunan Pengambilan
- 611 .21 Bendungan
- 611 .22 Bendungan Dengan Pintu Bilas
- 611 .23 Bendungan Dengan Pompa
- 611 .24 Pengambilan Bebas
- 611 .25 Pengambilan Bebas Dengan Pompa
- 611 .26 Sumur Dengan Pompa
- 611 .27 Kantung Lumpur
- 611 .28 Silf Ekstretor
- 611 .29 Escape Chenel
- 611 .3 Bangunan Pembawa
- 611 .31 Saluran
- 611 .311 Saluran Induk
- 611 .312 Saluran Sekunder
- 611 .313 Suplesi
- 611 .314 Tersier
- 611 .315 Saluran Kwarter
- 611 .316 Saluran Pasangan

611 .317 Saluran Tertutup / Terowongan
611 .32 Bangunan
611 .321 Bangunan Bagi
611 .322 Bangunan dan Sadap
611 .323 Bangunan Sadap
611 .324 Bangunan Check
611 .325 Bangunan Terjun
611 .33 Bax Tersier
611 .34 Got miring
611 .35 Talang
611 .36 Syphon
611 .37 Gorong-gorong
611 .38 Pelimpahan Samping
611 .4 Bangunan Pembuangan
611 .41 Saluran
611 .411 Saluran Pembuangan Induk
611 .412 Saluran Pembuangan Sekunder
611 .413 Saluran Pembuangan Tersier
611 .42 Bangunan
611 .421 Bangunan Outlet
611 .422 Bangunan Terjun
611 .423 Bangunan Penahan Banjir
611 .43 Gorong-gorong Pembuangan
611 .44 Talang Pembuang
611 .45 Syphon Pembuangan
611 .5 Bangunan Lainnya
611 .51 Jalan
611 .511 Jalan Inspeksi
611 .512 Jalan Logistik
611 .52 Jembatan
611 .521 Jembatan Inspeksi
611 .522 Jembatan Hewan
611 .53 Tangga Cuci
611 .54 Kubangan Kerbau
611 .55 Waduk Lapangan
611 .56 Bangunan Penunjang
611 .57 Jaringan Telepon
611 .58 Stasiun Argo
611 .59 Bangunan TPI dan Pasar Ikan
612 Polder
612 .1 Tanggul Keliling
612 .11 Tanggul
612 .12 Bangunan Penutup Sungai
612 .13 Jembatan
612 .2 Bangunan Pembawa
612 .21 Saluran
612 .211 Saluran Muka
612 .212 Saluran Membawa Induk

612 .213 Saluran Pembawa Sekunder
 612 .214 Saluran Stasiun Pompa Pemasukan
 612 .22 Bangunan Bagi
 612 .221 Gorong-gorong
 612 .222 Syphon
 612 .3 Bangunan Pembuangan
 612 .31 Stasiun Pompa Pembuangan
 612 .32 Saluran
 612 .321 Saluran Pembawa Induk
 612 .322 Saluran Pembawa Sekunder
 612 .33 Pintu Air Pembuangan
 612 .34 Gorong-gorong Pembuangan
 612 .35 Syphon Pembuangan
 612 .4 Bangunan Lainnya
 612 .41 Bangunan
 612 .411 Bangunan Pengukur Air
 612 .412 Bangunan Pengukur Curah Hujan
 612 .413 Bangunan Gudang Stasiun Pompa
 612 .414 Bangunan Listrik Stasiun Pompa
 612 .42 Rumah Petugas Eksploitasi
 613 Pasang Surut
 613 .1 Bangunan Pembawa
 613 .11 Saluran Pembawa Induk
 613 .12 Saluran Pembawa Sekunder
 613 .13 Saluran Pembawa Tersier
 613 .14 Saluran Penyimpanan Air
 613 .15 Saluran Pintu Pembuangan
 613 .2 Bangunan Pembuangan
 613 .21 Saluran Pembawa Induk
 613 .22 Saluran Pembawa Sekunder
 613 .23 Saluran Pembawa Tersier
 613 .24 Saluran Penyimpanan Air
 613 .25 Saluran Pintu Pembuangan
 613 .3 Bangunan Lainnya
 613 .31 Kolom Pasang
 613 .32 Saluran
 613 .321 Saluran Lalu Lintas
 613 .322 Saluran Muka
 613 .33 Bangunan
 613 .331 Bangunan Penangkis Kotoran
 613 .332 Bangunan Pengukur Muka air
 613 .333 Bangunan Pengukur Curah Hujan
 613 .34 Jalan
 613 .35 Jembatan
 614 Pengendalian Sungai
 614 .1 Bangunan Pengaman
 614 .11 Tanggul Banjir
 614 .12 Pintu Pengatur Banjir

- 614 .13 Klep Pengatur Banjir
- 614 .14 Tembok Pengaman Talut
- 614 .15 Krib
- 614 .16 Kantung Lumpur
- 614 .17 Check Dam
- 614 .18 Syphon
- 614 .2 Saluran Pengaman
- 614 .21 Saluran Banjir
- 614 .22 Saluran Drainage
- 614 .23 Corepure
- 614 .3 Bangunan Lainnya
- 614 .31 Warning System
- 614 .32 Stasiun
- 614 .321 Stasiun Pengukur Curah Hujan
- 614 .322 Stasiun Pengukur Air
- 614 .323 Stasiun Pengukur Cuaca
- 614 .324 Stasiun Pas Penjagaan
- 615 Pengaman Pantai
- 615 .1 Tanggul
- 615 .2 Krib
- 615 .3 Bangunan Lainnya
- 616 Air Permukaan (Danau,Waduk, Sungai)
- 616 .1 Stasiun Pompa
- 616 .2 Bangunan Pembawa
- 616 .3 Bangunan Pembuangan
- 616 .4 Bangunan Lainnya
- 620 JALAN
- 621 Jalan Kota/Kabupaten
- 621 .1 Daerah Penguasaan
- 621 .11 Ta n a h
- 621 .12 Tanaman
- 621 .13 Bangunan
- 621 .2 Bangunan Sementara
- 621 .21 Jalan Sementara
- 621 .22 Kantor Proyek
- 621 .23 Gedung Proyek
- 621 .24 Barak Kerja
- 621 .25 Laboratorium Lapangan
- 621 .26 Rumah
- 621 .3 Badan Jalan
- 621 .31 Pekerjaan Tanah (Earth Work)
- 621 .32 Stabilisasi
- 621 .4 Perkerasan
- 621 .42 Lapisan Pondasi
- 621 .43 Lapisan Permukaan
- 621 .5 Drainage
- 621 .51 Parit Tanah
- 621 .52 Gorong-gorong (culvert)

621 .6 Buku Trotoir
 621 .61 Tanah
 621 .62 Perkerasan
 621 .63 Pasangan
 621 .7 Me d i u m
 621 .71 T a n a h
 621 .72 Tanaman
 621 .73 Perkerasan
 621 .74 Pasangan
 621 .8 Daerah Sampingan
 621 .81 Tanaman
 621 .82 Pagar
 621 .9 Bangunan Pelengkap dan Pengaman
 621 .91 Rambu-rambu/Tanda-tanda Lalu Lintas
 621 .92 Lampu Penerangan
 621 .93 Lampu Pengaturan Lalu Lintas
 621 .94 Patok-patok KM
 621 .95 Patok-patok R.O.W (Sempadan)
 621 .96 Rel Pengamanan
 621 .97 Pagar
 621 .98 Turap Penahan
 621 .99 Bronjong
 622 Jalan Provinsi
 622 .1 Daerah Penguasaan
 622 .11 Tanah
 622 .12 Tanaman
 622 .13 Bangunan
 622 .14 Jalan Sementara
 622 .15 Jembatan Sementara
 622 .16 Kantor/Gedung Proyek
 622 .17 Barak Kerja
 622 .18 Laboratorium Lapangan
 622 .19 Rumah
 622 .2 Badan Jalan
 622 .21 Pekerjaan Tanah (Earth Work)
 622 .22 Stabilisasi
 622 .3 Perkerasan (Pavement)
 622 .31 Lapis Pondasi Bawah
 622 .32 Lapis Pondasi
 622 .33 Lapis Permukaan
 622 .4 Drainage
 622 .41 Parit
 622 .42 Gorong-gorong (Culvert)
 622 .43 Buku Trotoir
 622 .44 Tanah
 622 .45 Perkerasan
 622 .5 Trotoir
 622 .51 Tanah

- 622 .52 Perkerasan
- 622 .6 Medium
- 622 .61 Tanah
- 622 .62 Tanaman
- 622 .63 Perkerasan
- 622 .64 Pasangan
- 622 .1 Daerah Samping
- 622 .71 Tanaman
- 622 .72 Pagar
- 622 .8 Bangunan Perlengkapan dan Pengamanan
- 622 .81 Rambu-rambu
- 622 .82 Lampu Penerangan
- 622 .83 Lampu Pengatur lalu lintas
- 622 .84 Patok-patok KM
- 622 .85 Patok-patok R.O.W (sempadan)
- 622 .86 Rel Pengamanan
- 622 .87 Pagar
- 622 .88 Turap Penahan
- 622 .89 Bronjong
- 623 Jalan Nasional
- 623 .1 Daerah Penguasaan
- 623 .2 Badan Jalan
- 623 .3 Perkerasan (Lapis Pondasi, Lapis Permukaan)
- 623 .4 Drainase (Gorong-gorong, Parit)
- 623 .5 Median
- 623 .6 Daerah Samping (Pagar, Tanaman)
- 623 .7 Bangunan Pelengkap dan Pengamanan Rambu-rambu
- 630 JEMBATAN
- 631 Jembatan Pada Jalan Kota/Kabupaten
- 631 .1 Daerah Penguasaan Tanah
- 631 .12 Tanaman
- 631 .13 Bangunan
- 631 .2 Bangunan Sementara Jalan Sementara
- 631 .22 Jembatan Sementara
- 631 .23 Kantor Proyek
- 631 .24 Gedung Proyek
- 631 .25 Barak Kerja
- 631 .26 Laboratorium Lapangan
- 631 .27 Rumah
- 631 .3 Pekerjaan Tanah (Earth Work)
- 631 .31 Galian Tanah
- 631 .32 Timbunan Tanah
- 631 .40 Pondasi
- 631 .41 Pondasi Kepala Jembatan
- 631 .42 Pondasi Pilar
- 631 .43 Pondasi angker
- 631 .5 Bangunan Bawah
- 631 .51 Kepala Jembatan

631 .52 Pilar
 631 .53 Piloon
 631 .54 Landasan
 631 .60 Bangunan
 631 .61 Gelagar
 631 .62 Lantai
 631 .63 Perkerasan
 631 .64 Jalan Orang/Trotoir
 631 .65 Sandaran
 631 .66 Talang air
 631 .7 Bangunan Pengaman
 631 .71 Turap/Penahan
 631 .72 Bronjong
 631 .73 Strek Dam
 631 .74 Kist Dam
 631 .75 Coupute
 631 .76 Krip
 631 .8 Bangunan Pelengkap
 631 .81 Rambu-rambu/Tanda-tanda Lalu Lintas
 631 .82 Patak Pengamanan
 631 .83 Patak R.O.W. (Sempadan)
 631 .9 Oprit
 631 .91 Badan
 631 .92 Perkerasan
 631 .93 Drainage
 631 .94 Baku
 631 .95 Mediun
 632 Jembatan Pada Jalan Provinsi
 632 .1 Daerah Penguasaan
 632 .11 Tanah
 632 .12 Tanaman
 632 .13 Bangunan
 632 .2 Bangunan Sementara
 632 .21 Jalan Sementara
 632 .22 Jembatan Sementara
 632 .23 Kantor Provek
 632 .24 Gedung Proyek
 632 .25 Barak Kerja
 632 .26 Laboratorium Lapangan
 632 .27 Rumah
 632 .3 Pekerjaan Tanah (Earth Work)
 632 .31 Galian Tanah
 632 .32 Timbunan Tanah
 632 .4 Pondasi
 632 .41 Pondasi Kepala Jembatan
 632 .42 Pondasi Pilar
 632 .43 Pondasi Angker
 632 .5 Bangunan Bawah

- 632 .51 Kepala Jembatan
- 632 .52 Pilar
- 632 .53 Piloon
- 632 .54 Landasan
- 632 .6 Bangunan
- 632 .61 Gelagar
- 632 .62 Lantai
- 632 .63 Perkerasan
- 632 .64 Jalan Orang/Trotoir
- 632 .65 Sandaran
- 632 .66 Talang Air
- 632 .7 Bangunan Pengaman
- 632 .71 Turap/Penahan
- 632 .72 Bronjong
- 632 .73 Strek Dam
- 632 .74 Kist Dam
- 632 .75 Coupute
- 632 .76 Krip
- 632 .8 Bangunan Pelengkap
- 632 .81 Rambu-rambu/Tanda-tanda Lalu Lintas
- 632 .82 Patok Pengamanan
- 632 .83 Patok R.O.W. (Sempadan)
- 632 .9 Oprit
- 632 .91 Badan
- 632 .92 Perkerasan
- 632 .93 Drainage
- 632 .94 Baku
- 632 .95 Mediun
- 633 Jembatan Pada Jalan Nasional
- 633 .1 Daerah Penguasaan (Tanah, Tanaman Bangunan)
- 633 .2 Bangunan Sementara (Gudang Proyek, Kantor Proyek)
- 633 .3 Pondasi
- 633 .4 Bangunan Bawah
- 633 .5 Bangunan (Gelagar, Lantai, Sandaran, Perkerasan)
- 633 .6 Bangunan Pengamanan (Bronjong Strek Dam, Krib)
- 633 .7 Bangunan Pelengkap dan Pengaman (Rambu-rambu)
- 640 BANGUNAN
- 641 Bangunan Pemerintah
- 641 .1 Gedung Pengadilan
- 641 .2 Rumah Pejabat Negara
- 641 .3 Gedung DPR
- 641 .4 Gedung Balai Kota
- 641 .5 Penjara
- 641 .6 Perkantoran
- 642 Bangunan Pendidikan
- 642 .1 Taman Kanak-Kanak
- 642 .2 SD & Sekolah Menengah
- 642 .3 Perguruan Tinggi

- 643 Bangunan Rekreasi
- 643 .1 Bangunan Olah Raga
- 643 .2 Gedung Kesenian
- 643 .3 Gedung Pemancar
- 644 Bangunan Perdagangan
- 644 .1 Pusat Perbelanjaan
- 644 .2 Gedung Perdagangan
- 644 .3 Bank
- 644 .4 Perkantoran
- 645 Bangunan Pelayanan Umum
- 645 .1 Mandi, Cuci, kakus (MCK) Umum
- 645 .2 Gedung Parkir
- 645 .3 Rumah Sakit
- 645 .4 Gedung Telkom
- 645 .5 Terminal Angkutan Umum
- 645 .6 Terminal Angkutan Air
- 645 .7 Terminal Angkutan Darat
- 645 .8 Bangunan Keagamaan
- 646 Bangunan Peninggalan Sejarah
- 646 .1 Monumen
- 646 .2 Candi
- 646 .3 Kraton
- 646 .4 Rumah Tradisional
- 647 Bangunan Industri
- 648 Bangunan Tempat Tinggal
- 648 .1 Rumah Perkantoran
- 648 .11 Inti/Sederhana
- 648 .12 Sedang/Mewah
- 648 .2 Rumah Pedesaan
- 648 .21 Rumah Semi Permanen
- 648 .22 Rumah Contoh
- 648 .3 Real Estate
- 649 Elemen Bangunan
- 649 .1 Pondasi
- 649 .11 Diatas Tiang
- 649 .2 Dinding
- 649 .21 Penahan Beban
- 649 .22 Tidak Menahan Beban
- 649 .3 A t a p
- 649 .4 Lantai/Langit-langit
- 649 .41 Suspendend
- 649 .42 Solit
- 649 .5 Pintu/Jendela
- 649 .51 Pintu Hermonik
- 649 .52 Pintu Biasa
- 649 .53 Pintu Sarong
- 649 .54 Pintu Vertikal
- 649 .55 Jendela Kayu

649	.56	Jendela Sarong
649	.57	Jendela Vertikal
650		TATA RUANG KOTA
651		Daerah Perdagangan/Pelabuhan
651	.1	Daerah Pusat Perbelanjaan
651	.2	Daerah Perkantoran
652		Daerah Pemerintahan
653		Daerah Perumahan (Site dan Survei)
653	.1	Kepadatan Rendah (Low Density)
653	.2	Kepadatan Tinggi (High Density) Daerah Industri
654		Daerah Industri
654	.1	Industri Berat
654	.2	Industri Ringan
654	.3	Industri Rumah (Home Industri)
655		Daerah Rekreasi (Open Space)
655	.1	Publik Garden
655	.2	Sport dan Playing Fields
655	.3	Open Space
656		Transportasi (Tata Letak)
656	.1	Jaringan Jalan
656	11	Penerangan Jalan
656	.2	Jaringan Kereta Api
656	.3	Jaringan Sungai
657		Assineering
657	.1	Saluran Pengumpulan
657	.2	Instalasi Pengolahan
657	.21	Bangunan
657	.22	Bangunan Penyaring
657	.23	Bangunan Penghancur Kotoran
657	.24	Bangunan Pengendapan
657	.25	Bangunan Pengereng Lumpur
657	.26	Unit Disinfektan
657	.27	Unit Perpompaan
658		Kesehatan Lingkungan
658	.1	Persampahan
658	.11	Bangunan Pengumpulan
658	.12	Bangunan Pemusnahan
658	.13	Bangunan Pengolahan
658	.2	Pengotoran Udara
658	.3	Pengotoran Air
658	.31	Air Buangan Industri
658	.4	Kegaduhan
658	.5	Kebersihan Kota
660		TATA LINGKUNGAN
660	.1	Perijinan Bidang Lingkungan Hidup
660	.2	Rekomendasi Dokumen Lingkungan
660	.3	Lingkungan hidup
660	.4	Kebersihan Lingkungan

- 660 .5 Pencemaran
- 660 .51 Pencemaran Air
- 660 .52 Pencemaran Udara
- 660 .53 Pencemaran Tanah
- 660 .54 Pencemaran Limbah Padat dan Bahan Berbahaya Beracun (B3)
- 660 .6 Perubahan Iklim
- 661 Kerusakan Lingkungan
- 661 .1 Konservasi Pesisir dan Laut
- 661 .2 Konservasi Sumber Daya Alam
- 661 .3 Konservasi Tanah
- 662 Pentaatan Hukum Lingkungan
- 663 Laboratorium Lingkungan
- 663 .1 Air
- 663 .2 Udara
- 663 .3 Tanah
- 664 Analisis Dampak Lingkungan
- 665 Pengembangan Teknologi Lingkungan
- 666 Pengembangan Kapasitas
- 667 Pengembangan Lingkungan
- 670 KETENAGAAN
- 670 .1 Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah (RUKD)
- 671 Listrik
- 671 .1 Kelistrikan
- 671 .11 Perijinan
- 671 .12 Rekomendasi
- 671 .13 Pembinaan dan Pengawasan
- 671 .14 Kelistrikan PLN
- 671 .15 Kelistrikan Non PLN
- 671 .2 Pembangkit Tenaga Listrik
- 671 .21 PLTA- Pembangkit Listrik Tenaga Air
- 671 .22 PLTD-Pembangkit Listrik Tenaga Diesel
- 671 .23 TLTG-Pembangkit Listrik Tenaga Gas
- 671 .24 PLTM-Pembangkit Listrik Tenaga Matahari
- 671 .25 PLTN-Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir
- 671 .26 PLTN-Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi
- 671 .27 PLTU-Pembangkit Listrik Tenaga Uap
- 671 .28 PTTMH-Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro
- 671 .3 Transmisi Tenaga Listrik
- 671 .31 Gargu Induk/Gardu Penghubung/Gardu Trafo
- 671 .32 Saluran Udara Tenaga Listrik
- 671 .33 Kabel Bawah Tanah
- 671 .4 Distribusi Tenaga Listrik
- 671 .41 Gardu Distribusi
- 671 .42 Tegangan Menengah
- 671 .43 Tegangan Rendah
- 671 .44 Jaringan Bawah tanah
- 671 .5 Pengusahaan Listrik
- 671 .51 Sambungan Listrik

671 .52	Penjualan Tenaga Listrik
671 .53	Tarif Listrik
672	Tenaga Air
673	Tenaga Minyak
674	Tenaga Gas
675	Tenaga Matahari
676	Tenaga Nuklir
677	Tenaga Panas Bumi
678	Tenaga Uap
679	Tenaga Lainnya
680	PERALATAN PEKERJAAN UMUM
690	AIR MINUM
691	Intako
691 .1	Bromcaptering
691 .2	Sumur
691 .3	Bendungan
691 .4	Saringan (Screen)
691 .5	Pintu Air
691 .6	Saluran Pembawa
691 .7	Alat Ukur
691 .8	Perpompaan
692	Transmisi Air Baku
692 .1	Perpipaan
692 .2	Katup Udara (Air Rolief)
692 .3	Tutup Penguras (Blow off)
692 .4	Bak Pelepas Tekanan
692 .5	Jembatan Pipa
692 .6	Syphon
693	Instalasi Pengelolaan
693 .1	Bangunan Ukur
693 .2	Bangunan Aerasi
693 .3	Bangunan Pengendapan
693 .4	Bangunan Pembubuh Bahan Kimia
693 .5	Bangunan Pengaduk
693 .6	Bangunan Saringan
693 .7	Perpompaan (Termasuk di Dalamnya Rumah Pompa)
693 .8	Clear Hell
693 .9	Rumah Genset
694	Distribusi
694 .1	Reservoir Menara Bawah Tanah
694 .11	Menara
694 .12	Reservoir Menara Bawah Tanah
694 .2	Perpipaan
694 .3	Perpompaan
694 .4	Jembatan Pipa
694 .5	Syphon
694 .6	Hydran
694 .61	Hydran Umum

694 .62	Hydran Kebakaran
694 .7	Katup
694 .71	Katup Udara (Air Relief)
694 .72	Katup Pelepas (Blow off)
694 .8	Bak Pelepas Tekanan (Pressuer Reducing Valve)
700	PENGAWASAN
700 .1	Kebijakan dan Program Pengawasan
700 .2	Pengawasan Perencanaan Pengadaan/Proyek
701	Pengawasan Inventarisasi Asset
702	Pengawasan Organisasi dan Tata Laksana
703	Pengawasan Perpustakaan dan Dokumen
704	Pengawasan Penelitian/Riset
705	Pengawasan Perhubungan, Komunikasi informasi dan Teknologi
706	Pengawasan Pertanahan/BPN
710	BIDANG PEMERINTAHAN
711	Pengawasan pemerintahan Provinsi
712	Pengawasan Pemerintahan Kabupaten/Kota
713	Pengawasan Pemerintahan Desa
720	BIDANG POLITIK
721	Pengawasan Partai Termasuk Pendanaan Partai, Atribut Partai dll
722	Pengawasan Pembinaan Ipoleksosbud Hankam
723	Pengawasan Organisasi Meliputi Organisasi Kemasyarakatan, Profesi, Wanita, Buruh/Tani dan Kepemudaan
730	BIDANG KEAMANAN DAN KETERTIBAN
731	Pengawasan kesbangpolinmas
732	Pengawasan pelaksanaan penanggulangan Bencana Alam/SAR
740	BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT
741	Pengawasan Pembangunan Desa
742	Pengawasan Penyelenggaraan Pendidikan
743	Pengawasan Kebudayaan
744	Pengawasan Kesehatan/makanan/Obat
745	Pengawasan SARA (Suku Agama Ras)
746	Pengawasan Kesejahteraan Sosial
747	Pengawasan Kependudukan Migrasi/Urbanisasi
748	Pengawasan Kehumasan, Media Massa dan Penyiaran
749	Pengawasan Bantuan/Subsidi Masyarakat
750	BIDANG PEREKONOMIAN
751	Pengawasan Perdagangan dan Perindustrian
752	Pengawasan Pertanian dan Perkebunan
753	Pengawasan Kehutanan
754	Pengawasan Pertambangan/ESDM
755	Pengawasan Peternakan dan Kesehatan Hewan
756	Pengawasan Tenaga Kerja dan Ketrasmigrasian
757	Pengawasan PMDN/PMA
758	Pengawasan Perbankan / Moneter

- 759 Pengawasan Kelautan dan Perikanan
- 760 BIDANG PEKERJAAN UMUM
- 761 Pengawasan Pengairan
- 762 Pengawasan Jalan
- 763 Pengawasan Jembatan
- 764 Pengawasan Bangunan
- 765 Pengawasan Tata Ruang Kota
- 766 Pengawasan Tata Lingkungan
- 767 Pengawasan Ketenagaan
- 768 Pengawasan Air Minum
- 770 PENGAWASAN PEJABAT PUBLIK
- 771 Penyimpanan Pejabat Publik
- 780 PENGAWASAN KEPEGAWAIAN
- 781 Pengawasan Pengadaan PNS
- 782 Pengawasan Penilaian dan Disiplin PNS
- 783 Keanggotaan PNS Dalam Parpol
- 784 Penyimpangan Pejabat /PNS
- 785 Persengkataan PNS
- 790 BIDANG KEUANGAN
- 791 Pengawasan Anggaran
- 792 Pengawasan Akuntansi
- 793 Pengawasan Perbendaharaan
- 794 Pengawasan Pengelolaan Kas Daerah
- 795 Pengawasan Pendapatan
- 800 KEPEGAWAIAN
- Termasuk Lamaran, Pengujian Kesehatan dan Pengangkatan Calon Pegawai
- 800 .1 Perencanaan
- 800 .2 Penelitian
- 800 .3 Statistik
- 810 PENGADAAN
- 811 Pendaftaran CPNS
- 811 .1 Testing
- 811 .2 Screeniing
- 811 .3 Pengumuman Tes dan Pemanggilan
- 812 Pengujian Kesehatan
- 813 Pengangkatan CPNS
- 813 .1 Pengangkatan CPNS Golongan I
- 813 .2 Pengangkatan CPNS Golongan II
- 813 .3 Pengangkatan CPNS Golongan III
- 820 MUTASI
- 821 Pengangkatan
- 821 .1 Pengangkatan CPNS Menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS)
- 821 .11 Pengangkatan CPNS Menjadi Pegawai Negeri Sipil Golongan I
- 821 .12 Pengangkatan CPNS Menjadi Pegawai Negeri Sipil Golongan II
- 821 .13 Pengangkatan CPNS Menjadi Pegawai Negeri Sipil Golongan III

- 821 .2 Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural, Pembebasan Dari Jabatan, Berita Acara Serah Terima Jabatan, Pernyataan
- 821 .21 Eselon 1
- 821 .22 Eselon 2
- 821 .23 Eselon 3
- 821 .24 Eselon 4
- 821 .3 Pengangkatan Dalam Jabatan Fungsional, Pemberhentian Sementara, Pengangkatan Kembali, Pernyataan Menduduki Jabatan, Sumpah Janji
- 822 Kenaikan Gaji Berkala
- 822 .1 PNS Golongan I
- 822 .2 PNS Golongan II
- 822 .3 PNS Golongan III
- 822 .4 PNS Golongan IV
- 823 Kenaikan Pangkat
- 823 .1 PNS Golongan I
- 823 .2 PNS Golongan II
- 823 .3 PNS Golongan III
- 823 .4 PNS Golongan IV
- 824 Pemindahan/Pelimpahan/Pembantuan
- 824 .1 PNS Golongan I
- 824 .2 PNS Golongan II
- 824 .3 PNS Golongan III
- 824 .4 PNS Golongan IV
- 824 .5 Lolos Butuh (Mutasi Pegawai dari Instansi Lain)
- 825 Datasering dan Penempatan Kembali
- 827 Wajib Militer
- 830 KEDUDUKAN
- 831 Peninjauan Masa Kerja
- 832 Penyesuaian Perangkat/Gaji
- 832 .1 PNS Golongan I
- 832 .2 PNS Golongan II
- 832 .3 PNS Golongan III
- 832 .4 PNS Golongan IV
- 833 Penghargaan Ijasah (Pencantuman Gelar)
- 834 Penghargaan Lainnya
- 840 KESEJAHTERAAN PEGAWAI
- 841 Tunjangan
- 841 .1 Struktural dan Fungsional
- 841 .2 Kehormatan
- 841 .3 Dana Kematian (Uang Duka)
- 841 .4 Tunjangan Penghasilan
- 841 .5 Tunjangan Cacat
- 842 Dana
- 842 .1 Taspen
- 842 .2 Askes, Bantuan Kesehatan
- 842 .3 Bantuan Pendidikan
- 843 Perawatan Kesehatan

- 843 .1 Poliklinik, Klinik Konsultasi
- 843 .2 Perawatan Dokter
- 843 .3 Obat-Obatan
- 843 .4 Keluarga Berencana
- 844 Koperasi
- 845 Perumahan PNS
- 846 Dispensasi
- 847 Rekreasi
- 850 CUTI
- 851 Cuti Tahunan
- 852 Cuti Besar
- 853 Cuti Sakit
- 854 Cuti Bersalin
- 855 Cuti Karena Alasan Penting
- 856 Cuti Di Luar Tanggungan Negara
- 860 PENILAIAN
- 861 Penghargaan
- 861 .1 Bintang/Satyalencana Karya Satya
- 861 .2 Kenaikan Pangkat Anumerta
- 861 .3 Hadiah Berupa Kenaikan Pangkat
- 861 .4 Pegawai Teladan
- 862 Hukuman
- 862 .1 Ringan
- 862 .2 Sedang
- 862 .3 Berat
- 863 Konduite/Penilaian Prestasi Kerja
- 864 Ujian Kedinasan
- 864 .1 Ujian Dinas
- 864 .2 Ujian Kenaikan Penyesuaikan Ijazah
- 865 Peningkatan Kinerja
- 865 .1 Struktural
- 865 .2 Fungsional
- 866 Rehabilitasi
- 870 TATA USAHA KEPEGAWAIAN
- 871 Formasi
- 872 Bezetting/Daftar Urut Kepegawaian
- 873 Registrasi, Sistem Informasi Kepegawaian
- 873 .1 NIP
- 873 .2 KARPEG
- 873 .3 Legitimasi/Tanda Pengenal
- 873 .4 Daftar Keluarga
- 873 .5 KARSU/KARIS
- 874 Daftar Riwayat Pekerjaan
- 874 .1 Tanggal Lahir
- 874 .2 Penggantian Nama
- 875 Kewenangan Mutasi Kepegawaian
- 875 .1 Pelimpahan Wewenang
- 875 .2 Spesimen Tanda Tangan

876	Korps Kepegawaian
877	Sumpah Janji
880	PEMBERHENTIAN
881	Atas Permintaan Sendiri termasuk Pengunduran Diri
882	Dengan Hak Pensiun
882 .1	Pemberhentian dengan Hak Pensiun PNS Gol. I
882 .2	Pemberhentian dengan Hak Pensiun PNS Gol. II
882 .3	Pemberhentian dengan Hak Pensiun PNS Gol. III
882 .4	Pemberhentian dengan Hak Pensiun PNS Gol. IV
882 .5	Pensiun Janda/Duda
882 .6	Pensiun Yatim Piatu
882 .7	Uang Muka Pensiun
883	Karena Meninggal
884	Alasan Lain, Diantaranya Keuzuran Jasmani
885	Tidak Dengan Hormat
886	Pembekalan PNS Yang Akan Purna Tugas
890	PENDIDIKAN PEGAWAI
890 .1	Perencanaan Program dan Pelaporan Diklat
891	Pendidikan Prajabatan
892	Pendidikan Dalam Jabatan
892 .1	Diklatpim
892 .2	Diklat Teknis
892 .3	Diklat Fungsional
893	Kursus-kursus, Penataran, Bimbingan Teknis
894	Pengembangan Pegawai
894 .1	Tugas Belajar
894 .2	Ijin Belajar
894 .3	Tunjangan Belajar
894 .4	Bantuan Pendidikan
894 .5	Penempatan Kembali
895	Metode
895 .1	Kuliah
895 .2	Ceramah, Simposium
895 .3	Diskusi
895 .4	Kuliah Lapangan/OL, Widya Wisata, KKN
895 .5	Kurikulum
895 .6	Karya Tulis
896	Tenaga Pengajar, Nara Sumber
897	Administrasi Pendidikan
898	Fasilitas Pendidikan
899	Sarana Pendidikan
900	KEUANGAN
901	Nota Keuangan
902	APBN
903	APBD
904	DAK
905	DAU
910	ANGGARAN

- 911 Keputusan Tentang Penunjukan Pengelola Keuangan OPD/PPKD
- 912 Keputusan Bupati Tentang Penunjukan Pemimpin, Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis BLUD
- 913 Keputusan Bupati Berkaitan Pengaturan Teknis Pelaksanaan APBD
- 914 DPA/DPPA
- 915 Anggaran Kas
- 916 Surat Penyediaan Dana (SPD)
- 920 AKUNTANSI
- 921 Laporan-laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
- 930 PERBENDAHARAAN
- 931 Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)
- 932 Surat Penolakan Penerbitan SP2D
- 933 Daftar Penguji SP2D
- 934 SPJ Belanja Langsung
- 935 SPJ Belanja Tidak Langsung
- 936 SKPP (Surat Keterangan Penghentian Pembayaran)
- 940 PEMBINAAN KEBENDAHARAAN
- 941 Bintek-bintek/Kursus Yang Berkaitan Dengan Keuangan
- 950 PENGELOLAAN KAS DAERAH
- 951 Laporan Pemotongan IWP, Taperum, PPh 21 dari Gaji
- 952 Laporan Rekapitulasi Penerimaan Daerah
- 953 Daftar Pemotongan dan Penyetoran Pajak (PPN/PPh) dari CV/PT/instansi
- 954 Surat Tanda Setoran (STS)
- 955 Laporan Realisasi Daerah
- 955 .1 Laporan Realisasi Penerimaan Daerah
- 955 .2 Laporan Realisasi Pengeluaran Daerah
- 956 Rekonsiliasi
- 956 .1 Surat Setoran Rekonsiliasi Penerimaan
- 956 .2 Laporan Rekonsiliasi Bank
- 957 Laporan Mutasi Penempatan Deposito
- 958 Surat Perintah Transfer Uang (SPTU)
- 960 EVALUASI DAN PENGENDALIAN
- 961 Tuntutan Ganti Rugi
- 962 Tuntutan Perbendaharaan
- 963 Evaluasi dan Perubahan APBD Kabupaten/Kota
- 964 Evaluasi dan Pertanggungjawaban APBD Kabupaten/Kota
- 965 Edaran-edaran
- 970 PENDAPATAN
- 971 Perimbangan Keuangan
- 971 .1 Bagi Hasil Pajak
- 971 .11 Pajak Bumi Bangunan (PBB)
- 971 .12 Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (PBHTB)
- 971 .13 Pajak Penghasilan Orang Pribadi (PPh Pasal 21)
- 971 .2 Bagi Hasil Bukan Pajak
- 971 .21 Sumber Daya Alam/Migas

- 972 Subsidi
- 973 Pajak
 - 973 .1 Pajak Kendaraan Bermotor
 - 973 .2 Pajak Kendaraan Di Atas Air
 - 973 .3 Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
 - 973 .4 Pajak Pengembalian dan Pemanfaatan Air Permukaan
 - 973 .5 Pajak Reklame
- 974 Retribusi
 - 974 .1 Retribusi Bidang Kesehatan
 - 974 .2 Retribusi Bidang Seni Budaya dan Pariwisata
 - 974 .3 Retribusi Bidang Perekonomian, Perindustrian dan Perdagangan (Termasuk Pasar)
 - 974 .4 Retribusi Bidang Pertanian dan Peternakan (Termasuk Pemotongan Hewan)
 - 974 .5 Retribusi Bidang Perhubungan, Komunikasi, Informasi dan Teknologi (Termasuk Trayek, Kelebihan Muatan, Telekomunikasi, Parkir dll)
 - 974 .6 Retribusi Bidang Perkebunan dan Kehutanan (Termasuk Lintas dan Lelang Hasil Hutan, flora Fauna dll)
 - 974 .7 Retribusi Bidang Perikanan dan Kelautan
 - 974 .8 Retribusi Bidang Pertambangan, Pemanfaatan Air Permukaan dan Metrologi
 - 974 .9 Retribusi Bidang Lainnya (Termasuk Sampah)
- 975 Bea
 - 975 .1 Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
 - 975 .2 Bea Baliik Nama Kendaraan Di Atas Air
- 976 Cukai
- 977 Pungutan
- 978 Bantuan
 - 978 .1 Bantuan Presiden
 - 978 .2 Bantuan Menteri
 - 978 .3 Bantuan Gubernur
 - 978 .4 Bantuan Bupati
 - 978 .5 Bantuan Lainnya
- 979 Pendapatan Lainnya
 - 979 .1 Hasil Penjualan Asset Daerah Yang Tidak Dipisahkan
 - 979 .11 Pelepasan Hak Atas Tanah
 - 979 .12 Penjualan Rumah Jabatan/Rumah Dinas
 - 979 .13 Penjualan Kendaraan Dinas Roda 2
 - 979 .14 Penjualan Kendaraan Dinas Roda 4
 - 979 .15 Penjualan Bongkaran Bangunan dan Inventaris
 - 979 .16 Penjualan Drum Bekas
 - 979 .17 Penjualan Hasil Penebangan Pohon
 - 979 .2 Penerimaan Jasa Giro
 - 979 .21 Jasa Giro Kas Daerah
 - 979 .22 Jasa Giro Pemegang Kas
 - 979 .23 Jasa Giro Khusus
 - 979 .3 Penerimaan Bunga Bank

- 979 .31 Bunga Deposito
- 979 .32 Bunga Tabungan
- 979 .4 Penerimaan Ganti Rugi Atas Kerugian Atau Kehilangan Kekayaan Daerah (TP-TGR)
- 979 .41 Sumbangan Pihak Ketiga
- 979 .42. Sumbangan Pihak Ketiga Kendaraan (Dealer)
- 979 .43 Sumbangan Pihak Ketiga Kayu
- 979 .5 Penerimaan Lain-lain
- 979 .51 Penerimaan Kembali Kredit BKK
- 979 .52 Ternak Tidak Layak Bibit
- 979 .53 Sewa Internet
- 979 .54 Penerimaan dari Dana Bergulir/Revolving
- 979 .55 Kerjasama Dengan BUMIDA
- 979 .56 Penerimaan DUKS
- 979 .57 Tempat Rekreasi Nusakambangan
- 979 .58 Setoran TP-TGR
- 979 .59 Penerimaan Lainnya dari Setda/SKPD
- 980 -
- 990 -

BUPATI PEKALONGAN,

ttd

ASIP KHOLBIHI

Diundangkan di Kajen
Pada tanggal 13 November 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN

Ttd

MUKAROMAH SYAKOER

BERITA DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2017 NOMOR 84

Salinan sesuai aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEKALONGAN



AGUS PRANOTO, SH, MH
Pembina Tk. I
NIP. 19670914 199703 1 005

